

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kecamatan Wanareja merupakan salah satu kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Wanareja terletak 98 Kilometer dari Ibukota Kabupaten Cilacap. Secara geografis Kecamatan Wanareja terletak di wilayah Cilacap Bagian Barat, merupakan satu dari dua kecamatan di wilayah barat yang berbatasan langsung dengan Kota Banjar Propinsi Jawa Tengah. Di selatan batas Desa Madura berbatasan langsung dengan Kecamatan Langgensari Kota Banjar, di bagian Utara ada Desa Jambu yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuningan. Disebelah Timur ada desa adimulya dan Limbangan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Majenang. Disebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Cipari. Dan di sebelah barat dengan Kecamatan Dayeuhluhur.

Wanareja sendiri terdiri dari 16 desa yaitu :

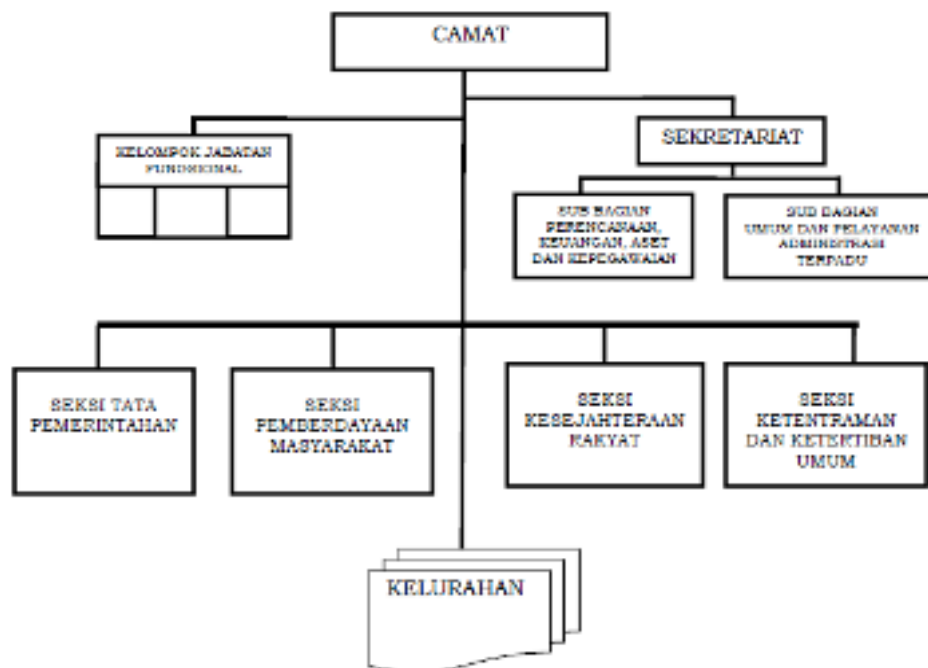
1. Desa Purwasari
2. Desa Cilongkrang
3. Desa Tarisi
4. Desa Bantar
5. Desa Adimulya
6. Desa Wanareja

7. Desa Sidmaulya
8. Desa Madura
9. Desa Limbangan
10. Desa Malabar
11. Desa Majingklak
12. Desa Madusari
13. Desa Tambaksari
14. Desa Palugon
15. Desa Jambu
16. Desa Cigintung.

Letak Geografis yang berbatasan dengan Propinsi Jawa Barat menjadikan Wanareja salah satu Kecamatan yang mempunyai budaya yang berbeda dengan Kecamatan lainnya di Wilayah Kabupaten Cilacap. Di Kecamatan Wanareja, ada beberapa desa yang mayoritas penduduknya merupakan suku sunda, dan bahasa daerah yang dipergunakan sehari-hari juga bahasa sunda. Sementara di Wilayah Kecamatan Wanareja yang lain mayoritas berbahasa jawa. Letak demografi juga berbeda-beda ada beberapa desa di Kecamatan Wanareja yang merupakan daerah pegunungan, sehingga karakteristik masyarakat dan lingkungannya juga berbeda, ada juga daerah yang merupakan dataran. Potensi kerawanan bencana Kecamatan Wanareja juga beragam, banjir, tanah longsor, tanah bergerak, kebakaran hutan menjadi ancaman dan seringkali terjadi tiap tahunnya. Ini semua tentunya menjadikan pemerintah desa harus benar-benar jeli

dalam memilih program dan kegiatan yang dimasukkan kedalam perencanaan pembangunan desanya masing-masing.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 111 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan , sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah sekaligus Kepala Wilayah. Dalam pelaksanaan tugasnya Camat dibantu oleh satu Administrator (sekretaris) dan juga beberapa Pengawas (Kepala Seksi/Sub Bagian) seperti yang terlihat pada Struktur Organisasi dibawah ini.



Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Wanareja

Dari struktur organisasi tersebut dapat dilihat bahwa Camat merupakan Pimpinan Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi di bantu oleh :

1. Sekretaris Kecamatan
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan PATEN
2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
4. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
5. Kepala Seksi Ketenraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan sesuai dengan tugas pokok sebagai pengampu tugas Bupati diwilayah, maka Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kebijakan pemerintah daerah kecamatan;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan atau kelurahan
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi Camat sesuai Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut:

Camat menyelenggarakan fungsi :

- 1). Merumuskan dan menetapkan perencanaan lingkup kecamatan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) merumuskan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat berdasarkan rencana strategis kecamatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- 3) melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat;
- 4) mengoordinasikan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan

ketertiban umum sertapelayanan kepada masyarakat dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, instansi vertikal dan lembaga di luar kedinasan serta tokoh/pemuka agama dalam lingkup kecamatan;

- 5) mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi masing-masing dengan prinsip pembagian tugas habis;
- 6) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat ;
- 7) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 8) melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan untuk pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- 9) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat;

- 10) mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan;
- 11) membina pengelolaan tertib administrasi pertanahan di tingkat kecamatan;
- 12) memfasilitasi penyusunan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sebagai upaya pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa;
- 13) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan yang diselenggarakan oleh unit kerja baik pemerintah maupun swasta;
- 14) mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan kecamatan dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan administrasi terpadu;
- 15) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai wujud pertanggungjawaban;
- 16) mengarahkan dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memacu prestasi kerja;
- 17) menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan kebijakan; dan
- 18) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Peraturan Bupati nomor 111 tahun 2016 menyebutkan bahwa Camat mempunyai tugas untuk memfasilitasi penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, serta melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan untuk pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan. Munculnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memperkuat posisi desa untuk bisa mengelola pemerintahannya sendiri dengan Kewenangan yang ada pada desa, dana desa yang dikucurkan pemerintah untuk bisa mewujudkan masyarakat desa yang semakin baik dalam semua aspek, mewujudkan pembangunan desa yang bermuara pada Tujuan Nasional yaitu Masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Cita-cita Bangsa.

Sejak dana desa digulirkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa dari 2015 sampai dengan sekarang, banyak manfaat yang bisa diperoleh oleh desa, terutama dalam pembangunan desa. Banyak desa terutama di Kecamatan Wanareja yang mempunyai Infrastruktur yang sudah lebih baik dari sebelum digulirkannya Dana Desa ini. Pengelolaan Keuangan Desa di desa mungkin memang belum dilaksanakan secara maksimal. Akan tetapi dari tahun ke tahun Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam hal ini melalui Pemerintah Kecamatan Wanareja juga senantiasa melakukan Pendampingan-pendampingan untuk pengelolaan keuangan desa. baik secara langsung dengan pelatihan-pelatihan, akan tetapi juga dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Sehingga harapannya Pengelolaan Keuangan Desa secara bertahap bisa menuju akuntable

dan sesuai dengan Peraturan yang ada, dan semakin sedikit penyimpangan yang ditemukan.

Tabel 4.1.

Besaran Dana Desa yang dikelola Pemerintah Desa di Kecamatan Wanareja

No	Nama Desa	Anggaran Dana Desa		
		2021	2022	2023
1	Purwasari	1.019.754.000	1.029.000.000	1.061.988.000
2	Cilongkrang	958.691.000	947.924.000	962.197.000
3	Tarisi	1.147.928.000	1.192.048.000	1.098.732.000
4	Bantar	1.247.530.000	1.231.534.000	1.302.316.000
5	Adimulya	1.594.222.000	2.057.048.000	1.645.772.000
6	Wanareja	1.359.640.000	1.471.768.000	1.515.306.000
7	Sidamulya	1.050.554.000	1.020.562.000	1.109.834.000
8	Madura	1.457.062.000	1.562.852.000	1.372.727.000
9	Madusari	1.173.335.000	1.085.301.000	1.006.132.000
10	Majingklak	1.207.460.000	1.131.759.000	1.054.043.000
11	Malabar	1.332.501.000	1.388.709.000	1.320.796.000
12	Limbangan	1.706.789.000	1.886.097.000	1.652.720.000
13	Tambaksari	931.246.000	896.301.000	836.889.000
14	Palugon	1.004.142.000	942.529.000	856.302.000
15	Jambu	1.350.930.000	1.054.291.000	1.009.180.000
16	Cigintung	919.020.000	843.507.000	788.009.000

Sumber : Data Dana Desa dari seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja

Dari tabel tersebut bisa dilihat besaran dana desa yang digulirkan kepada Pemerintah Desa. Anggaran yang digulirkan adalah angka yang tidak sedikit, rata-rata desa mendapatkan hampir 1 milyar rupiah tiap tahunnya. Itu semua untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera sesuai dengan tujuan utama pemberian Dana Desa. Dana desa tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Ketahanan Pangan, Peningkatan Infrastruktur Desa, Pencegahan stunting, dan juga program Bantuan Langsung Tunai. Untuk melaksanakan semua program tersebut seyogyanya juga ada dukungan Sumber Daya Manusia yang kompeten agar bisa dilaksanakan efektif dan Pengelolaan Keuangan Desa juga akuntable.

Sumber daya manusia dalam pemerintahan desa lazim disebut sebagai perangkat desa terdiri dari Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Urusan, serta Kepala Kewilayahan yaitu Kepala Dusun (Kadus). Perangkat desa tersebut terlibat langsung dalam Pengelolaan Keuangan Desa, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Jumlah perangkat desa dikecamatan Wanareja ada 270 perangkat desa aktif dari 16 desa yang ada diwilayah Kecamatan Wanareja. Nomenklatur Jabatan untuk para perangkat desa disesuaikan dengan status desa menurut Profil Desa/Keluarahan. Apabila pada jaman dahulu profesi Perangkat Desa hanya terbatas diminati oleh masyarakat desa di lingkungan desa tersebut dan biasanya mempunyai tingkat pendidikan yang bisa dikatakan minim dan berusia diatas 30an, untuk 7 tahun kebelakang ada fenomena jabatan perangkat desa diminati

oleh orang yang berusia muda dan mempunyai tingkat pendidikan yang lumayan tinggi. Hal ini bisa dilihat dari jumlah perangkat desa saat ini mempunyai latar belakang pendidikan yang bagus. Terjunnya para pemuda yang mempunyai wawasan dan pandangan yang luas diharapkan bisa memberikan kontribusi positif dalam proses administrasi Pengelolaan Keuangan Desa, bukan hanya administrasi selesai dengan cepat akan tetapi seluruh prosedur juga dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan yang ada. Berikut adalah data perangkat desa di wilayah Kecamatan Wanareja.

Tabel 4.2
Data Perangkat Desa Berdasarkan Pendidikan

No	Nama Jabatan	Pendidikan				
		S 1	Diploma	SLTA	SLTP	SD
1	Kepala Desa	3	-	13	-	-
2	Sekretaris Desa	13	2	1	-	-
3	Kaur Umum	-	-	4	-	-
4	Kaur Keuangan	9	-	7	-	-
5	Kaur Perencanaan	1	-	4	-	-
6	Kaur Tata Usaha dan Umum	1	1	1	-	-
7	Kaur Umum dan Perencanaan	2	-	5	1	-
8	Kasi Pemerintahan	4	-	12	-	-
9	Kasi Kesejahteraan	4	3	9	-	-
10	Kasi Pelayanan	3	2	11	-	-
11	Staf Kasi/Kaur	1	1	29	9	4

12	Kadus	7	4	67	20	12
	Jumlah	48	13	163	30	16

Sumber data : Dokumen internal data perangkat desa dari Seksi Tata Pemerintahan Kec. Wanareja

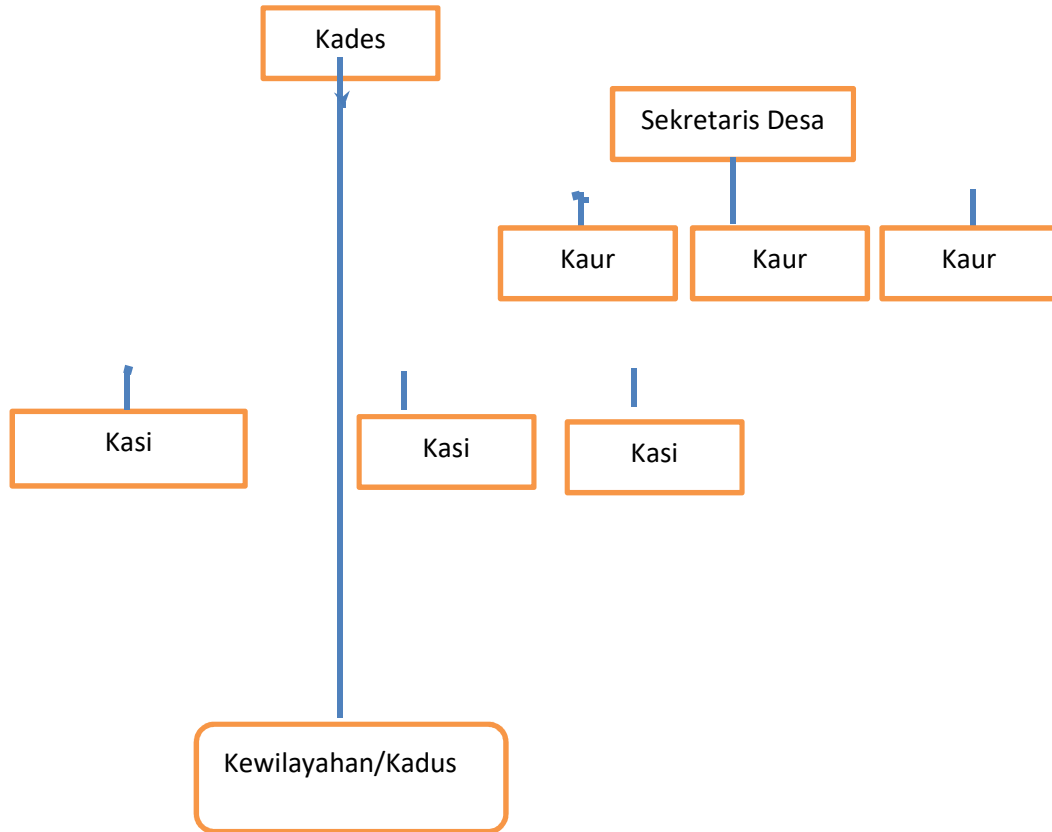
Dari data diatas bisa dilihat tingkat pendidikan yang beragam dari perangkat desa yang ada di Kecamatan Wanareja. Kepala desa (Kades) di Kecamatan Wanareja yang mempunyai pendidikan Sarjana memang masih relatif sedikit hanya 18, 75 persen atau 3 orang dari total 16 kepala desa. Untuk jabatan Sekretaris Desa (Sekdes) ada 81,25 % atau 13 orang dari total 16 Sekretaris Desa yang ada. Sementara dalam jabatan Kasi dan Kaur jumlah perangkat desa yang mempunyai pendidikan sarjana juga relatif masih sedikit hanya sekitar 20% dari total jumlah kaur/kasi yaitu 15 orang. Pendidikan dominan yang menjabat sebagai Kasi/Kaur di desa adalah lulusan SLTA sederajat baik itu SMA maupun SMK. Untuk kewilayahan atau Kadus juga masih sangat sedikit Kadus yang mengenyam pendidikan tinggi bahkan sampai ketingkat sarjana. Dari total 110 kadus hanya ada 7 orang yang mempunyai pendidikan sarjana, bahkan masih ada kadus yang berpendidikan SD dan SMP, kedepan mungkin akan lebih banyak lagi karena banyak pula para kadus yang juga sudah mendekati umur pensiun.

4.1.2 Efektifitas Sumber Daya Manusia Di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap

Penelitian ini dilakukan di desa, diwilayah Kecamatan Wanareja. Sampel yang diambil adalah 3 Desa di Wilayah Kecamatan Wanareja yaitu Desa Madura, Desa Sidamulya dan Desa Tambaksari. Ketiga desa ini dari hasil pengamatan awal dari data yang tersedia pada seksi Tata Pemerintahan

Kecamatan Wanareja mempunyai beberapa hal yang menarik selama rentang waktu 2021 sampai 2023. Penelitian untuk tesis ini dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan yaitu dari mulai tanggal 25 April 2024 sampai dengan 31 Mei 2024.

Dalam Penelitian ini terlihat bahwa struktur organisasi 1 (satu) dari 3 (tiga) desa yang diteliti berbeda dengan dua desa yang lainnya. Perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan status desa sesuai dengan profil desa dan kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa Susunan Organisasi Pemerintah Desa dibedakan berdasarkan tingkat perkembangan desa, yaitu Swadaya, Swakarsa dan Swasembada. Desa Tambaksari mempunyai status Desa Swasembada, sedangkan dua Desa yang lain yaitu Desa Madura dan Desa Sidamulya adalah Desa Swakarya. Desa Swasembada wajib memiliki 3 urusan dan 3 seksi, dan untuk desa swakarya dapat memiliki 3 urusan dan 3 seksi.



Gambar 4.2.
Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Struktur Organisasi tersebut merupakan gambaran struktur yang digunakan di Pemerintahan Desa, pemilihan nomenklatur Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) disesuaikan dengan jenis tingkatan desa menurut prodeskel.

Desa Tambaksari, merupakan desa yang ada di bagian atas dari Kecamatan Wanareja berjarak ±13 Km dari Ibukota Kecamatan Wanareja dengan jarak tempuh ± 50 menit, merupakan salah satu desa yang terletak di pegunungan,

berbatasan langsung dengan Kecamatan Dayeuhluhur, yaitu Desa Ciwalen disebelah selatan dan Desa Dayeuhluhur disebelah barat sedangkan di bagian utara berbatasan dengan Desa Palugon dan disebelah timur dengan desa Majingklak, keduanya merupakan desa di wilayah Kecamatan Wanareja. Dengan Luas Wilayah mencapai 765,50 Ha dan jumlah penduduk 3140 orang (profil desa tambaksari). Karakteristik Struktur Organisasi di Desa Tambaksari berbeda dengan 2 desa sampel yang lain. Tambaksari merupakan salah satu dari 4 Desa Swasembada yang ada di Kecamatan Wanareja. Sebagai Desa Swasembada maka susunan organisasi Desa Tambaksari adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa (Kades)
2. Sekretaris Desa (Sekdes)
3. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum (Kaur tata usaha dan umum)
4. Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan)
5. Kepala Urusan Perencanaan (Kaur Perencanaan)
6. Kepala Seksi Pemerintahan
7. Kepala Seksi Pelayanan
8. Kepala Seksi Kesejahteraan
9. Staf Kasi dan Kaur
10. Kepala Dusun (Kadus) Kubangreja
11. Kepala Dusun (Kadus) Pakembaran
12. Kepala Dusun (Kadus) Tangleg
13. Kepala Dusun (Kadus) Tambaksari
14. Kepala Dusun (Kadus) Gunung Geulis

Sumber daya manusia atau perangkat Desa Tambaksari merupakan modal organisasi yang baik dan sangat potensial, meskipun berada di daerah atas akan tetapi masyarakatnya cukup sadar akan pentingnya pendidikan. Banyak perangkat desa yang sudah menempuh pendidikan ditingkat pendidikan tinggi. Berikut adalah data perangkat desa tambaksari.

Tabel 4.3.

Data Perangkat Desa Tambaksari

No	Nama Jabatan	Pendidikan	Usia
1	Kepala Desa	Sarjana	34 Tahun
2	Sekretaris Desa	Diploma III	35 Tahun
3	Kaur Keuangan	Sarjana	41 Tahun
4	Kaur Perencanaan	Sarjana	25 Tahun
5	Kaur Tata Usaha dan Umum	Diploma III	45 Tahun
6	Kasi Pemerintahan	SLTA	57 Tahun
7	Kasi Pelayanan	SLTA	39 Tahun
8	Kasi Kesejahteraan	Diploma III	36 Tahun
9	Staf Kasi Pemerintahan	SLTA	52 Tahun
10	Staf Kaur Umum	SLTA	47 Tahun
11	Kadus Kubangreja	Diploma III	38 Tahun
12	Kadus Pakembaran	SLTA	39 Tahun
13	Kadus Tambleg	SLTA	45 Tahun
14	Kadus Tambaksari	SLTA	36 Tahun
15	Kadus Gununggeulis	SLTA	45 Tahun

Sumber Data : Data Perangkat Desa dari Seksi Tata Pemerintahan Kec. Wanareja

Pada Tahun 2022 Desa Tambaksari berhasil masuk kedalam 3 besar desa se propinsi Jawa Tengah dalam lomba Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Provinsi Jawa Tengah, ini menunjukkan bahwa Desa Tambaksari mampu bersaing dengan Desa-desa lain di Propinsi Jawa Tengah. Selain itu penghargaan tersebut juga menunjukkan bahwa Desa Tambaksari melakukan Pemberdayaan Masyarakat dan melakukan tata kelola Administrasi Pemerintahan Desa secara akuntable, efektif dan efisien. Dalam lomba tersebut banyak indikator yang diukur baik dari sumber daya pengelolaan administrasi desa, juga capaian hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tambaksari untuk mencapai tujuan Pembangunan sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Desa.

Berkenaan dengan Karakteristik Struktur Organisasi Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Responden atau narasumber. Narasumber yang ditanya oleh peneliti adalah Perangkat desa dari desa sample, Pendamping Desa, Kasi dan Pelaksana di Seksi Tata Pemerintahan serta Camat Wanareja.

1. Apakah masing-masing perangkat desa mengetahui Tugas Pokok dan Fungsinya baik tugas pokok dan fungsi sesuai nomenklatur jabatannya maupun tugas pokok dan fungsi dalam Tim PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa).

- a. Menurut AS, (Kaur Keuangan)

“ setiap perangkat desa tambaksari sudah tau dengan tupoksi sendiri-sendiri. Apabila ada peraturan baru maka biasanya akan dibahas bersama dengan perangkat desa yang lain. Sekiranya tidak mudeng dan ada yang harus dijelaskan lebih banyak lagi, kita akan tanya ke pendamping desa

ataupun ke orang kecamatan agar bisa lebih memahami hal tersebut. Disamping juga tanya dengan desa lain”.

b. Menurut OL, (Pendamping Desa)

“ perangkat desa tambaksari mereka sudah sangat memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing, baik tupoksi dalam pekerjaan sehari-hari maupun tupoksi dalam PPKD. Mereka juga pinter dan mau bertanya apabila dirasa ada yang kurang dipahami, dari pada salah mereka lebih suka berdiskusi dengan Pendamping Desa atau juga dengan Pendamping Lapangan Desa. mereka juga manut apabila diberi tahu kalau ada pekerjaan yang sekiranya harus dibetulkan karena masih belum sesuai dengan yang seharusnya. ”

c. Menurut SR, (Sekretaris Desa)

“ semua memahami tupoksi, dan kita saling bekerjasama dan bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas.”

d. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tapem Kec. Wanareja)

“ tambaksari perangkatnya semua mudengan, mampu menjalankan tugas dengan baik. Pak kades juga bisa membawa perangkat yang lain untuk guyub bekerja sama sehingga semua diselesaikan tepat waktu dan hasilnya pun bagus”

e. Menurut Md, (Pelaksana Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ desa tambaksari perangkat desanya kompak, solid dan mampu menjalankan tugas dengan baik. Merupakan tim yang kompak dan saling bantu, guyub sehingga memudahkan pekerjaan.”

2. Seperti apa pembagian tugas dalam pengelolaan keuangan desa di desa tambaksari ?

a. Menurut SR, (Sekdes tambaksari)

“ pembagian tugas dalam pengelolaan keuangan desa mengacu kepada peraturan yang ada, mengacu pada permendagri 20 th 2018. Ada dua unsur yaitu Kades sebagai pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa dan Perangkat Desa sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa. dan ini dikuatkan dengan adanya SK Kepala Desa. didalam SK tersebut sudah disebutkan tugas dari masing-masing orng yang masuk ke tim PPKD.

b. Menurut AS, (Kaur Keuangan Desa Tambaksari)

“ada SK yang dibuat untuk menerangkan siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa di desa tambaksari. Kita bekerja juga berdasarkan itu salah satunya.”

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ semua desa sebelum memulai tahun anggaran yang baru wajib memiliki SK PPKD, karena didalam SK tersebut merupakan dasar untuk bisa melaksanakan tugas. Perangkat desa yang terlibat atau yang masuk dalam SK PPKD wajib tahu akan tugas pokoknya sesuai dengan yang tercantum di dalam SK tersebut.”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa / PD Kecamatan Wanareja)

“ sesuai dengan aturan yang ada setiap desa wajib membuat SK PPKD, Kades sebagai Pemegang kuasa atas pengelolaan keuangan desa, sekdes dan perangkat desa yang lain adalah pelaksana pengelolaan keuangan desa. tugas perorangan sebagai pengelola keuangan desa juga dicantumkan di SK, untuk semua desa di wilayah kecamatan wanareja pasti membuat ini.”

e. Menurut Md, (pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ Sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.”

3. Bagaimanakah koordinasi antar anggota dalam tim pengelola keuangan desa dan antar kasi atau kaur di desa tambaksari?

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tambaksari terdiri dari :

- Koordinator Tim adalah Sekretaris Desa Tambaksari
- Pelaksana Kegiatan adalah Kaur dan Kasi di Desa Tambaksari
- Pelaksana Fungsi Bendahara adalah Kaur Keuangan Desa Tambaksari

a. Menurut SR, (Sekdes Tambaksari)

Koordinasi antar anggota dalam tim sering dilakukan karena pekerjaan juga dilakukan bareng-bareng dikantor, kalo ada apa-apa seperti kekurangan administrasi lebih mudah diatasi. Untuk koordinasi antar kasi dan kaur juga baik dan mudah karena kita semua sudah berkomitmen

untuk bisa nge-tim, satu tim lah biar semua pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu, saling membantu sudah hal yang lumrah”

b. Menurut AS, (Kaur Keuangan Desa Tambaksari)

“Koordinasi kasi dan kaur mah kita solid, kita sering ngobrol bareng untuk membahas pekerjaan, bilih aya titipan tagihan pekerjaan juga kita sampaikan dan kalo memang butuh bantuan, satu dan yang lainnya juga saling bantu. Karena kalau tidak begitu toh yang ditagih akhirnya kades saat rakor di kecamatan , kita –kita juga yang di telpon untuk memenuhi permintaan tersebut.”

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ Sarana untuk berkoordinasi banyak, bisa lewat grup wa, bisa pada saat rakoor sekdes, rakoor bendahara, biasanya kita sampaikan tagihan pekerjaan seandainya ada tagihan. Untuk desa tambaksari yang dilihat untuk koordinasi lumayan nyambung dan baik, hubungan antar personal itu sudah solid sehingga pekerjaan bisa jalan tanpa ada perintah dua kali. Mereka terbiasa melakukan pekerjaan dengan sat set dan tetap saling berhubungan, sehingga apa bila ada kendala bisa cepat diatasi.”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ Tambaksari tim yang kompak, mudah untuk berkomunikasi dan berkoordinasi walaupun hanya lewat whats app, apabila ada yang tidak dimengerti maka cepat akan berkoordinasi dengan yang tahu masalah tersebut.”

e. Menurut Md, (Pelaksana seksi Tata Pemeritahan Kecamatan Wanareja)

“ terjalin komunikasi yang baik antar pernagkat desa sehingga memudahkan dalam koordinasi, dan mereka tidak ada slek atau tidak ada masalah antar pribadi sehingga menjadi tim yang kompak, dan mereka orang-orang yang santai, guyub dan mau belajar. ”

4. Apabila menemukan permasalahan bagaimana sistem koordinasi untuk memecahkan masalah tersebut?

a. Menurut SR, (Sekretaris Desa Tambaksari)

“ yang mengalami masalah biasanya apabila itu adalah kasi/kaur maka pertama-tama menyampaikan hal tersebut kepada Sekdes sebagai Koordinator manajemen di kantor, apabila bisa dipecahkan dengan berdiskusi antara kasi, kaur dan sekdes maka selesai, dan sekdes tetap membicarakan hal tersebut dengan Kepala Desa. apabila tidak ditemukan

jalan keluar maka biasanya berdiskusi bersama dengan kades untuk mencari jalan keluar. Bisa juga melibatkan Pendamping Desa (via telp menyampaikan permasalahan yang ditemui dilapangan dan meminta pertimbangan seperti apa pandangan dr PD dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. ”

b. Menurut AS, (Kaur Keuangan Desa Tambaksari)

“ Lapor kepada Sekdes dan Kades untuk meminta pendapat bagaimana seharusnya menghadapi kendala tersebut”

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ biasanya bisa diselesaikan oleh kades selaku pimpinan tertinggi sekaligus sebagai Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa, apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan di desa, biasanya akan ada laporan ke Kecamatan, baik langsung dr sekdes, ataupun dari pendamping. Nantinya seksi Tata Pemerintahan biasanya akan berdiskusi dengan pendamping untuk pemecahan masalahnya, apabila dirasa susah untuk mengeksekusi jalan keluar permasalahan maka biasanya ini akan dibawa dulu ke meeting struktural di Kecamatan sehingga bisa didiskusikan permasalahan dengan jabatan struktural yang lain baik itu kasi/kasubbag dan juga Sekretaris Kecamatan dan Camat selaku pimpinan wilayah. Jadi secara heirarki / bertahap tingkatan penyelesaian masalahnya.”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ berdiskusi dengan pihak yang terkait melalui jalur struktural yang sudah ada.”

e. Menurut Md, (pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ berdiskusi dan meminta pendapat dengan yang lebih tau, mereka tidak segan untuk bercerita kepada staf sekalipun saat ke Kecamatan sehingga apabila memang bisa ditemukan solusi mereka pasti akan mendengarkan pendapat dari semua pihak, mau mendengarkan jadi agak lebih mudah untuk mendapatkan solusi dari suatu maslaah. karena mendengarkan jadi bisa ditimbang mana yang lebih baik sebagai jalan keluarnya.

Untuk aspek penggunaan/peran teknologi, Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada para narasumber sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan teknologi untuk menunjang tugas-tugas pada organisasi?

a. Menurut SR, (Sekretaris Desa Tambaksari)

“ tambaksari sudah memanfaatkan sistem seperti Siskeudes untuk pelaksanaan pembukuan dan penatausahaan, bahkan di 2023 juga sudah mulai melakukan transfer antar bank untuk pembayaran beberapa transaksi, untuk pelaporan capaian kegiatan dilakukan input oleh Seksi Tapem Kecamatan dan untuk capaian Bansus dilakukan oleh seksi PM Kecamatan. Sementara untuk input proposal Bansus desa melakukan input melalui aplikasi BaSo (bantuan khusus online). Aplikasi atau sistem sudah banyak dan sejauh ini kita bisa mengikuti dan juga berusaha untuk menerapkan dan melaksanakan karena memang pasti semakin tahun pastinya kita akan semakin banyak bersentuhan dengan sistem teknologi. Asal mau belajar pasti bisa, apalagi kita masih relatif muda lah. Pusing sedikit ya gak apa apa yang penting bisa lebih mudah dalam bekerja, walaupun kadang pusing soalnya ini tergantung sinyal jg , cm ya semaksimal mungkin dikerjakan karena sudah menjadi keharusan. ”

b. Menurut AS, (Kaur Keuangan Desa Tambaksari)

“ Desa tambaksari sudah menjalankan siskeudes kalo tidak salah sejak siskeudes mulai dikenalkan dan dilakukan pelatihan di tahun 2018. Dari perencanaan, penatausahaan dan pelaporan dilaksanakan melalui sistem ini. Selain itu juga ada Baso itu khusus untuk input bantuan khusus yang diterima, dimana proposal bantuan diupload disitu. Untuk sistem mau tidak mau memang kita harus mau belajar karena kita juga dimudahkan dengan ini, meskipun memang agak ribet karena seperti no. BKU itu harus sama dengan no. Kwitansi dan itu dari sistem. Harus sabar tapi kalo sudah biasa ya akan lebih enak karena pelaporan jadi mengurangi tingkat kesalahannya. Dan pas ada pemeriksaan dari inpektorat lebih tenang karena semua sudah terrekam disistem jadi laporannya dipandang lebih terpercaya.”

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“tambaksari termasuk desa yang perangkatnya aktif menggunakan teknologi, baik untuk pengelolaan keuangan desa melalui siskeudes maupun aplikasi Baso dna juga aplikasi persuratan untuk administrasi perkantoran.”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ tambaksari perangkatnya mau belajar, siskeudes tambaksari juga sudah melakukan transfer antar bank, dan untuk siskeudes memang yang dari awal aktif menggunakan itu tambaksari dan sidamulya”

- e. Menurut Md, (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ tambaksari termasuk desa yang maju, mau menggunakan teknologi dan sistem yang ada, penata usahaan dan pelaporannya juga termasuk yang tertib, administrasi rapi. ”

2. Apakah semua perangkat bisa menggunakan teknologi untuk membantu pelaksanaan tugasnya?

- a. Menurut SR, (Sekdes Tambaksari)

“ untuk siskeudes sementara hanya sekdes dan Bendahara/Kaur Keuangan”

- b. Menurut AS, (Kaur Keuangan)

“ Hanya Sekdes dan saya, pengennya ada satu lagi untuk input perencanaan sementara masih baru belajar karena masih baru”

- c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ Harusnya semua tim pelaksana kegiatan bisa melakukan input terutama untuk input RAB kan banyak itu, tergantung kegiatannya dari bidang 1 sampai bidang 4. Untuk saat ini memang masih sebatas sekdes dan kaur keuangan kebanyakan dari 16 desa masih 2 orang ini cm ada beberapa yang mulai memberbantuan kaur yang membidangi perencanaan untuk melakukan input siskeudes.”

- d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ semua anggota tim pelaksana kegiatan baik kaur atau kasi harusnya bisa melakukan input hanya di Kecamatan Wanareja tidak berjalan seperti itu, di wanareja masih kebanyakan sekdes yang melaksanakan dibantu oleh bendahara atau beberapa ada juga yang kasi kesra dna bendahara atau perencanaan ikut membantu juga”

- e. Menurut Md, (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ harusnya semua bisa akan tetapi banyak masih menjadi tugas sekretaris desa dan bendahara .”

Untuk aspek Karakteristik Lingkungan Internal, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut kepada para narasumber :

1. Bagaimana cara merencanakan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di dalam organisasi?

a. Menurut SR, (Sekretaris Desa Tambaksari)

“sebenarnya untuk memilih siapa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan sudah jelas karena diatur dalam peraturan siapa saja yang boleh terlibat. Perangkat Desa yang menjadi pengelola keuangan sudah ditentukan jabatannya siapa saja dan sebagai apa serta tugas pokok dan fungsinya sudah dijelaskan dalam aturan yang berlaku. Mungkin seandainya ada jabatan kosong dalam perangkat desa pun pada saat pengisian perangkat itu memang sudah ditetapkan oleh panitia siapa saja yang berhak mendaftar, siapa yang lolos seleksi administrasi dan siapa yang mengikuti ujian. Penentuan berhasil tidaknya seseorang menjadi seorang perangkat desa juga ditentukan oleh hasil tes perangkat desa. dan itu semua sudah ada aturannya dan ditetapkan oleh panitia pengisian perangkat desa. sehingga menentukan siapa saja yang terlibat menjadi pengelola keuangan desa tetap menjadi hak kades dan kembali sudah diatur oleh peraturan yang berlaku. ”

b. Menurut AS, (Kaur Keuangan Desa Tambaksari)

“ pengelola keuangan ditentukan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, siapa saja yang terlibat disitu juga sudah ada dalam peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. jadi ya mau tidak mau orang tersebut harus mau terlibat disitu dengan semua tanggung jawabnya. ”

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ personil yang nantinya terlibat dalam pengelolaan keuangan desa sudah disebutkan dalam permendagri nomor 20 tahun 2018, lengkap dengan tugas pokok dan fungsinya. Orang-orang tersebut tentunya disahkan dikuatkan dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh kepala desa sebagai dasar legalitas mereka dalam menjalankan tugasnya. ”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“sudah ada aturan yang mengatur, yaitu permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban.”

e. Menurut Md, (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“Permendagri nomor 20 tahun 2018. Siapa saja yang terlibat dan tugas pokok fungsinya sudah ada, tinggal dibuatkan SK Kades tentang PPKD”.

2. Menurut anda pengelola yang ada saat ini sudah mempunyai skill yang cukup untuk posisi tersebut?

a. Menurut SR, (Sekretaris Desa Tambaksari)

“yang ada tersedia itu difungsikan dan digunakan dengan maksimal, tentang skill tentunya pengalaman juga banyak andil dalam pekerjaan. Disamping itu regulasi dari tahun ke tahun selalu berubah sehingga mau tidak mau kita harus tetap mengikuti agar bisa tetap sejalan dengan aturan yang digunakan”.

b. Menurut AS, (Kaur Keuangan Desa Tambaksari)

“ kalo skill atau keahlian mungkin bisa dipelajari dari pengalaman, yang harus menjadi dasar adalah mungkin sikap dari individu itu mau bekerja keras dan mau belajar karena aturannya sering berubah-ubah jadi terkadang harus sellau update dengan aturan dan menyesuaikan diri lagi untuk bisa melaksanakan aturan itu dnegan baik. Perlu adanya bintek atau pelatihan yang rutin biar bisa selalu mempunyai ilmu yang baru dan pengetahuan baru”.

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemeritahan Kecamatan Wanareja)

“ dari aturan yang ada sudah ditetapkan siapa yang ikut serta, tentang skill dan keahlian saya rasa semua perangkat desa apalagi di level sekdes dan kaur keuangan sebagai salah satu yang mempunyai peran banyak dalam pengelolaan keuangan sudah cukup mumpuni tinggal mereka senantiasa meng update aturan dan mengikuti instruksi yang diperikan oleh dispermades melalui Pendmapping Desa dan juga tim dari Kecamatan. Selama mengikuti bimbingan teknis dna pelatihan dengan benar dan diterapkan maka skill yang ada cukup untuk melakukan pengelolaan keuangan desa. kecuali orang tersebut adalah orang yang tidak mudeng dnegan aturan dan keras kepala mengikuti kemaunnya sendiri maka itu tidak mungkin akan menghasilkan pengelolaan keuangan desa yang akuntable dan efesien.”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ skill yang ada cukup karena sering juga dilaksanakan bintek, pelatihan dan juga pendampingan tentang aturan yang harus dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa. ”

e. Menurut Md, (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“untuk tambaksari skill yang ada sudah cukup bagus, apalagi dengan latar belakang pendidikan perangkat desa nya yang baik, banyak yang mengenyam pendidikan tinggi dan juga banyaknya pelatihan baik yang diselenggarakan oleh dispermades, maupun oleh Kecamatan dan Paguyuban.”

3. Bagaimana Komunikasi dilingkungan internal pengelolaan keuangan?

a. Menurut SR, (Sekretaris Desa)

“baik, saling mendukung dan tidak ada masalah diantara masing-masing personel. Apabila ada hal yang sangat mendesak kita biasa menggunakan media telepon, seperti misalnya ada kekurangan sesuatu saat sekdes ada di Kecamatan dan minta dicarikan data di desa bisa cepat meskipun hanya melalui telepon. Ada rapat berkala terkait pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran. Saling berkoordinasi antara kades, sekdes dan perangkat desa yang lain.”

b. Menurut AS, (Kaur Keuangan)

“saling bertukar informasi dalam pelaksanaan pekerjaan, melaksanakan perintah sesuai dengan yang diminta, apabila belum jelas maka kita bisa menanyakan hal tersebut. Ada pertemuan rutin membahas terkait pekerjaan yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Kita mudah berkomunikasi karena sudah bekerja bersama cukup lama sehingga paham karakter pribadi masing-masing dan cara kita harus berkomunikasi dengan si a seperti apa, kita sudah sangat paham karakternya.”

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ hubungan baik antar perangkat desa, baik kades dengan sekdes dan perangkat desa yang lain sangat memudahkan, dari dulu sampai sekarang siapapun kadesnya tambaksari kompak, seperti keluarga antar perangkat sehingga komunikasi mereka juga bagus dan nyambung satu dengan yang lain, kalo ada yang lemot/loading yang lain cepet bantu sehingga tugas selesai tepat waktu.”

d. Menurut Ol, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“di tambaksari penyampaian komunikasi antara kades, sekdes dan perangkat lain lebih mudah karena mereka sering berdiskusi dan kadesnya pun memahami tugas-tugas yang ada, meskipun masih berusia muda akan tetapi kades mempunyai misi yang bagus dan memahami administrasi harus seperti apa sehingga solid dalam kekompakan timnya.”

e. Menurut Md, (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ komunikasi terjalin dengan baik, karena sudah enak dalam bekerja bersama, dan untuk tambaksari meski banyak perangkat masih berusia muda tapi kompak dan nuani, dalam arti berbicara sebagai orang yang lebih tua dan mengayomi ya mereka bisa, nyambung sehingga tidak ada mis komunikasi dalam timnya.”

Untuk aspek karakteristik Lingkungan Eksternal, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana cara komunikasi dengan perangkat di luar organisasi?

a. Menurut SR, (Sekretaris Desa Tambaksari)

“ komunikasi dengan perangkat diluar organisasi biasanya dilakukan dgn masyarakat, personil dari Kecamatan, dan OPD/Dinas baik dr lingkungan kab ataupun propinsi, dan kalanya dengan anggota dewan (DPRD), ya kita berusaha untuk memahami apa yang menjadi tujuan dari yang dimaksud/ yang diminta. Kita selama ini ya berusaha memenuhi pesan yang disampaikan lewat komunikasi tersebut. Kita berkomunikasi dengan baik. Biasanya kalo dengan masyarakat kita bisa langsung, dengan kecamatan juga bisa langsung dari kecamatan berkomunikasi langsung dengan saya atau pak kades, dari OPD/Dinas biasanya lewat kecamatan diteruskan ke sekdes/kades seperti itu biasanya .”

b. Menurut AS, (Kaur Keuangan Desa Tambaksari)

“ kalo komunikasi dari luar organisasi yang langsung dengan saya paling dari Kecamatan baik dari seksi tapem/PM atau dari PD itu pun biasanya sebatas menanyakan teknis atau dalam rakor bendahara, kalo dari kasi tapem/PM/ pak Camat biasanya langsung dengan pak sekdes/kades. Apalagi OPD/Dinas ya langsung dengan Kades/ Kecamatan. Saya dan teman-teman kasi/kaur yang lain mendapat informasi ya dari pak sekdes/kades. Jadi biasanya berjenjang.”

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemeirntahan Kecamatan Wanareja)

“ untuk komunikasi kita bisa dengan banyak cara, lewat surat, rapat koordinasi, komunikasi langsung saat diperlukan, monitoring dan evaluasi langsung ke desa. biasanya kita berhubungan langsung dengan sekdes atau kades. Untuk komunikasi biasanya dilakukan berjenjang, dan selama ini lancar dalam komunikasi, tidak susah karena apabila ada mis atau bukan itu yang dimaksud kita biasanya langsung kontak secara personal baik ke kades atau sekdes. Intinya selalu ada yang bisa kita hubungi saat ada keperluan yang mendesak dan informasi tersebut sampai kepada yang dituju dan maksud dari komunikasi tersampaikan dengan tepat”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ komunikasi berjalan dengan baik diantara para perangkat desa baik dengan saya atau pihak dari dispermades atau kecamatan. Pak kades juga mudah diajak berbicara tentang apa saja untuk menyelesaikan pekerjaan.”

e. Menurut Md , (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ tambaksari termasuk desa yang perangkatnya mudah untuk dihubungi, ditembusi dan gampang dalam berkomunikasi sehingga apabila ada sesuatu hal yang kurang akan mudah untuk segera diselesaikan.”

2. Bagaimana pembagian disposisi jika ada perintah / disposisi dari luar organisasi ?

a. Menurut SR, (Sekretaris Desa Tambaksari)

“ disposisi dari luar lebih banyak dari Kecamatan, dan itu bisa lewat surat/telepon. Seandainya disampaikan langsung dari kecamatan ke saya biasanya saya sampekan dulu ke pak kades, kemudian beliau biasanya setelah mendapatkan berita ya mengumpulkan saya dan kasi/kaur terkait untuk menindak lanjuti, tapi lebih banyak di sampaikan ke saya untuk menindaklanjuti lebih detailnya.”

b. Menurut AS, (Kaur Keuangan Desa Tambaksari)

“disposisi dari luar biasanya lewat surat/telepon tapi langsung ke kades/sekdes. Untuk Tindaklanjutnya biasanya, sekdes dipanggil terlebih dahulu oleh kades kemudian baru nanti kasi/kaur dipanggil juga untuk menindak lanjuti hal tersebut.”

- c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemeirntahan Kecamatan Wanareja)

“disposisi biasanya kita bersurat ke desa, atau kalo itu mendesak dilakukan via telp ke kades, atau sekdes. Biasanya kalo tambaksari kadesnya mudeng kalo ditelp dan akan menyampaikan ke sekdesnya. Tapi ada desa yang kita harus telp ke sekdesnya juga karena kadesnya nggak dong dengan maksud dari disposisi yang kita minta, atau kadesnya biasanya bilang telp aja pak sekdes biar cepet, biasane ada yang begitu.”

- d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ langsung ke kades/sekdes kita tinggal berkoordinasi tentang tindak lanjutnya saja.”

- e. Menurut Md , (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ tambaksari lebih mudah menerima disposisi dari kecamatan karena kades dan perangkatnya cepat menangkap informasi yang masuk.”

Untuk aspek Karakteristik Personal, diajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana jika terjadi masalah pada masing-masing personil ?

- a. Menurut SR, (Sekretaris Desa Tambaksari)

“ sebisa mungkin diselesaikan agar tidak menjadi penghalang dalam bekerja, karena bila ada masalah kan biasanya menjadi tidak bisa berkomunikasi dengan baik dna imbasnya kepekerjaan, selama ini sih belum ada yang berlarut-larut dan menjadi serius.”

- b. Menurut AS, (Kaur Keuangan Desa Tambaksari)

“ diselesaikan sebelum menjadi mengganggu pikiran masing-masing dan menjadikan hubungan pertemanan terganggu dan berpengaruh ke situasi pekerjaan dan pekerjaan tidak selesai.”

- c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemeirntahan Kecamatan Wanareja)

“ berusaha untuk diselesaikan, pribadi orang kan bermacam-macam sudut pandang juga kadang berbeda sehingga wajar apabila ada perbedaan pendapat, tapi hendaknya ini tidak menjadi debat kusir bekepanjangan dan menjadi permasalahan yang mengganggu pekerjaan, sehingg apabila ditemukan benturan ya seyogyanya di rembug bersama antara yang bermasalah untuk bisa diselesaikan masalahnya. Demi situasi yang

kondusif karena bagaimanapun situasi lingkungan pekerjaan yang kondusif akan membawa pikiran positif untuk bisa memacu kita berkomunikasi dengan baik dan pekerjaan akan menjadi lebih mudah dan lebih ringan tentunya”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ biasanya apabila ada masalah ya harus diselesaikan agar tidak berimbas ke pekerjaan”

e. Menurut Md , (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“kalau masalah yang sangat serius sampai berpengaruh kepada kinerja biasanya akan didudukkan, kades atau sekdes boleh karena mereka mempunyai kekuasaan untuk itu, tapi samapai sekarang sih hampir semua masalah yang timbul bisa diselesaikan dengan baik”

2. Bagaimana cara mengatasi perbedaan sikap/pandangan dalam mengatasi masalah organisasi?

a. Menurut SR, (Sekretaris Desa Tambaksari)

“ mengungkapkan sikap dan pandangan masing-masing dalam diskusi yang kita adakan baik itu melalui rapat atau sekedar kumpul terbatas dengan begini semua akan saling mengerti latar belakang pandangan masing-masing, kita akan mencoba mencari titik temu yang mudah dan ditengah-tengah, tanpa memaksakan ke pendapat salah satu. Pak kades biasanya menjadi centralnya, karena bagaimanapun semua kebijakan yang diambil yang bertanggung jawab adalah beliau”

b. Menurut AS, (Kaur Keuangan Desa Tambaksari)

“ saling berbagi informasi dan berbicara untuk bisa menyamakan persepsi demi menyelesaikan pekerjaan, sepemahaman harus bisa saling mengalah mempertahankan ide masing-masing. Biasanya kades memutuskan setelah berdiskusi harus seperti apa, biar tidak ada yang sakit hati.”

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemeirntahan Kecamatan Wanareja)

“ satu kata dan kades bisa menyatukan visi dan pendapatnya, kades hendaknya bisa memanej semua perngkat yang ada dibawahnya. Karena kades merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sehingga dia bisa mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ kades bisa menjadi penengah dan pembuat keputusan akhir apabila terdapat perbedaan pendapat antar personil mengingat kades merupakan pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa”

- e. Menurut Md , (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“kades bisa membuat keputusan mana yang pendapat yang bisa dipakai untuk melakukan pekerjaan, jalan mana yang harus ditempuh untuk menyelesaikan suatu masalah. Eksekusi terakhir ada pada kebijakan kepala desa.”

Dalam aspek kebijakan manajemen, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pimpinan dalam organisasi ?

- a. Menurut SR, (Sekretaris Desa Tambaksari)

“ kebijakan pimpinan berarti kebijakan kepala desa kan ya, kepala desa kan dipilih oleh masyarakat, tentunya kebijakan yang diambil kebanyakan ya untuk memenuhi keinginan masyarakat, agar desa mampu memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Contoh untuk pembangunan sarana jalan ya mungkin atas kebijakan kades ya jalan ke arah pendukungnya dulu yang di dahulukan di betulkan / dipelihara karena disana ada kontrak politik, kasarnya begitu. Sejauh ini sih kebijakan yang diambil tidak terlalu menjadi pro dan kontra di masyarakat dan kebijakan tersebut dapat dijalankan oleh perangkat desa tambaksari”.

- b. Menurut AS, (Kaur Keuangan Desa Tambaksari)

“ tiap kepala desa pasti punya kebijakan tersendiri, beda kades beda kebijakan, asalkan itu semua buat kebaikan masyarakat dan kita sebagai perangkat bisa menjalankan itu dan tidak keberatan ya biasa aja buat kita. Sejauh ini sih belum ada yang aneh-aneh dari kebijakan yang diambil pak kades. Kebijakan yang ada masih bisa dijalankan”

- c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemeirntahan Kecamatan Wanareja)

“kebijakan kades tentunya masing-masing desa tidak sama, akan tetapi selama ini kebijakan kades ya tidak ada yang protes karena ya sudah menjadi konsekuensi perangkat pasti menjalankan kebijakan tersebut, sepanjang semua disetujui oleh BPD, dan untuk masyarakat ya pasti akan dilaksanakan. seandainya ada yang tidak setuju dengan kebijakan kades pun, biasanya itu akan tetap dilaksanakan sepanjang tidak menentang hukum dan hanya perorangan yang tidak setuju ya tetap berjalan. Kenapa

karena kepala desa mempunyai legitimasi tersendiri, kades dipilih oleh masyarakat sendiri, sehingga misal kebijakan terlalu menguntungkan satu pihak pendukungnya juga tidak akan terlalu dimasalahkan. Sampai saat ini sih kebijakan masih wajar, dan bisa dipahami oleh semua unsur baik masyarakat, perangkat dan juga tomasnya.”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ setiap kebijakan ya harus dilaksanakan karena itu keputusan kades, perangkat desa hanya menjalankan instruksi dari kades, sepenuhnya kebijakan ya tanggung jawab kades ”

e. Menurut Md , (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“perangkat hanya menjalankan kebijakan pimpinan. Kades mestinya dalam mengambil suatu kebijakan sudah mempertimbangkan banyak hal.”

2. Apakah memicu peningkatan prestasi pada anggota organisasi?

a. Menurut SR, (Sekretaris Desa Tambaksari)

“ sebenarnya kalo langsung sih sejauh ini tidak ada imbasnya langsung kecuali mungkin dalam penarikan PBB, kebijakan untuk bisa lunas dalam pelaksanaan gebyar PBB misalkan maka bisa lebih berpeluang mengikuti undian pelunasan gebyar yang diselenggarakan oleh BPPKAD, yang lain sih tidak terlalu ada pengaruhnya mungkin kalo jaman dulu ada mengingat dulu masih sering ada pungutan kalo semisal PBB kan ada upah pungut sekarang tidak bisa lagi, upah pungut sudah ditentukan dari kabupaten besarnya dan siapa saja yang menerima ”

b. Menurut AS, (Kaur Keuangan Desa Tambaksari)

“ tidak ada pengaruhnya secara individu mungkin kalo secara lembaga, nama desa gitu ada, seperti Desa Tambaksari menjadi juara Lomba Desa ataupun juara lunas PBB terawal dan mendapatkan hadiah kendaraan tapi itukan institusi, bukan perorangan”

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ agak susah untuk perangkat desa berprestasi, karena berprestasi atau tidak , bagi perangkat desa tidak ada ukurannya. Kinerja mereka kan tidak ada penilaiannya. Berbeda dengan PNS yang ada sasaran kinerja pegawai bisa diukur sejauh mana prestasi kerjanya. Kalo perangkat desa berbeda. Ada dan tidak ada prestasi juga sama tidka mempengaruhi siltap yang diberikan.”

- d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)
 “sepertinya tidak berpengaruh, tidak ada hubungannya dengan prestasi perangkat desa”
 - e. Menurut Md , (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)
 “ tidak ada sepertinya ”
3. Bagaimana cara pimpinan merespon konflik antar anggota?
- a. Menurut SR, (Sekretaris Desa Tambaksari)
 “ apabila ada perbedaan pendapat biasanya yang berkonflik akan didudukkan oleh kades, di tanya duduk persoalannya seperti apa, di ceramahi biasanya, dan ya bersama-sama mencari solusi, dan juga diingatkan kalo konflik pastinya akan menghambat segalanya”
 - b. Menurut AS, (Kaur Keuangan Desa Tambaksari)
 “ didudukkan, ditanya bareng-bareng akar masalahnya dimana, kemudian ngobrol, ceramah harusnya seperti apa,diingetin kalo konflik akar masalah dan bisa jadi menghambat rejeki”
 - c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemeirntahan Kecamatan Wanareja)
 “ menjadi penengah, dan memastikan konflik selesai tidak berkepanjangan”
 - d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)
 “ mengayomi, menjadi penengah agar konflik selesai, duduk bersama mencari solusi dari masalah”
 - e. Menurut Md , (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)
 “ kalo sama kades biasane manut, jadi ya kades harus bisa menjadi juru damai, mencari solusi dan memastikan apabila hal-hal seperti itu jangan sampai terulang lagi dimasa yang akan datang”

Secara global Camat Wanareja, IA juga menyampaikan pandangannya terhadap semua aspek efektifitas yang ada di Desa Tambaksari, sebagai berikut :

“ Struktur desa tambaksari memang berbeda menyesuaikan dengan status desanya, sumber daya manusai tambaksari potensial untuk bisa terus berkembang dan mengikuti dinamika regulasi yang seringkali berubah-ubah. Kades dan perangkatnya semangat dan masih muda, ini dibuktikan dengan suksesnya Desa Tambaksari masuk 3 besar Desa berprestasi dalam Lomba Desa tingkat Propinsi di tahun 2022, harapannya apa yang sudah baik dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Untuk pengelolaan administrasi desa dan juga pengelolaan keuangan desa sejauh ini juga baik. SDM yang ada potensial untuk mampu mengikuti teknologi yang digunakan. Tambaksari juga disamping wilayahnya potensial untuk berkembang, pemberdayaan masyarakatnya juga jalan disana. Ini semuatentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat tambaksari sendiri. Menurut saya Desa Tambaksari sudah cukup efektif dalam pengelolaan keuangan desanya, dengan sumber daya yang ada. Hasil Monitoring dan Evaluasi tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tambaksari sepanjang tahun 2023 pekerjaan Fisik selesai dengan kualitas baik, administrasi juga selesai, pajak dibayarkan tepat waktu juga jadi secara keseluruhan cukup efektif. Bangunan fisik untuk masyarakat juga banyak dibuat fasum ya seperti jamban umum, penampungan air bersih, sumur bor dan itu bisa digunakan banyak masyarakat yang membutuhkan”

Desa kedua yang menjadi Lokus sample penelitian adalah Desa Madura, Desa ini terletak di jalur utama Jalan Nasional III, merupakan desa paling barat dari Kecamatan Wanareja, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Panulisan Kecamatan Dayeuhluhur. Di bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Langensari Kota Banjar Propinsi Jawa Barat, disebelah Timur berbatasan dengan Desa Wanareja, dan di sebelah utara dengan Desa Madusari. Berjarak 7 Km dari pusat Pemerintahan Kecamatan, dengan jumlah penduduk 14.510 jiwa atau 5.008 KK, mempunyai luas wilayah 1.819 Ha (profil desa madura). Berdasarkan Profil Desa dan Kelurahan Desa Madura mempunyai status Desa Swakarya, yaitu desa yang mempunyai 2 urusan dan 3 seksi. Susunan Perangkat Desa di Desa Madura adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa (Kades)
2. Sekretaris Desa (Sekdes)

3. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan (Kaur Umum dan Perencanaan)
4. Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan)
5. Kepala Seksi Pemerintahan (Kasi Pemerintahan)
6. Kepala Seksi Pelayanan (Kasi Pelayanan)
7. Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra)
8. Staf Kasi dan Kaur
9. Kepala Dusun (Kadus) Babakan
10. Kepala Dusun (Kadus) Karanganyar
11. Kepala Dusun (Kadus) Purwasari
12. Kepala Dusun (Kadus) Margasari
13. Kepala Dusun (Kadus) Karangsari
14. Kepala Dusun (Kadus) Ciopat
15. Kepala Dusun (Kadus) Mangunjaya

Sumber daya manusia organisasi atau perangkat Desa Madura ada beberapa orang yang merupakan lulusan sarjana atau perguruan tinggi, kebanyakan masih sebatas lulusan setingkat Pendidikan Menengah Atas. Berikut adalah data perangkat Desa Madura.

Tabel 4.4.
Data Perangkat Desa Madura

No	Nama Jabatan	Pendidikan	Usia
1	Kepala Desa	SLTA	37 Tahun
2	Sekretaris Desa	Sarjana	30 Tahun
3	Kaur Umum dan Perencanaan	Sarjana	32 Tahun
4	Kaur Keuangan	SLTA	22 Tahun
5	Kasi Pemerintahan	SLTA	57 Tahun
6	Kasi Pelayanan	Sarjana	27 Tahun
7	Kasi Kesejahteraan	SLTA	34 Tahun
8	Staf Kaur Umum dan Perencanaan	SLTA	52 Tahun
9	Staf Kasi Pemerintahan	SLTA	56 Tahun
10	Staf Kasi Kesejahteraan	SLTA	57 Tahun
11	Staf Kasi Pelayanan	SLTP	57 Tahun
12	Kadus Babakan	SLTP	57 Tahun
13	Kadus Karanganyar	SLTP	57 Tahun
14	Kadus Purwasari	Sarjana	26 Tahun
15	Kadus Margasari	SLTP	40 Tahun
16	Kadus Karangsari	SLTA	54 Tahun
17	Kadus Ciopat	Sarjana	32 Tahun
18	Kadus Mangunjaya	SD	54 Tahun

Sumber Data : Data Perangkat Desa dari Seksi Tata Pemerintahan Kec. Wanareja

Pemerintah Desa Madura jika dilihat dari data diatas ada 9 orang yang usianya mendekati usia pensiun, tentunya ini juga berpengaruh kepada kinerja

organisasi. Dari data awal monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim Kecamatan Wanareja, pada tahun 2023 madura agak tersendat dalam proses penatausahaan dan pertanggungjawabannya.

Untuk aspek Karakteristik Struktur Organisasi Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Responden atau narasumber. Narasumber yang ditanya oleh peneliti adalah Perangkat desa dari desa sample, Pendamping Desa, Kasi dan Pelaksana di Seksi Tata Pemerintahan serta Camat Wanareja.

1. Apakah masing-masing perangkat desa mengetahui Tugas Pokok dan Fungsinya baik tugas pokok dan fungsi sesuai nomenklatur jabatannya maupun tugas pokok dan fungsi dalam Tim PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa).

a. Menurut EN, (Sekdes Madura)

“ Untuk Tupoksi masing-masing sebenarnya sih ya tau, tapi ya gitu kalo yang sudah berumur gitu suka agak susah nangkep aturannya kalo ada perubahan. Kadang juga seperti pekerjaan ya harus terus aja ditanyakan karena biasanya kalo tidak ditanyakan ya suka tidak dikerjakan.ujung-ujungnya telat numpuk SPJ”

b. Menurut OL, (Pendamping Desa)

“ Desa Madura perangkatnya tentang tupoksi sebenarnya tau mah sudah tapi paham secara paham betul-betul, ada dalam tim PPKD itu yang tidak terlalu paham, tapi harus ikut karena dia adalah Kasi. Ketidapahamannya mungkin karena sudah berumur sehingga ya harus selalu dituntun, harus selalu dibantu oleh yang lain, tapi ini menjadi kendala karena orang membantu setelah pekerjaannya sendiri selesai, sehingga ya tetep agak keteteran pekerjaannya ”

c. Menurut EW, (Kaur Perencanaan dan Umum)

“ ya saya juga masih belajar, Cuma untuk tupoksi sedikit-sedikit saya sudah paham dan bisa membantu sekdes dan kaur keuangan dengan tanggungjawab yang saya emban. Kendala mungkin memang agak susah

untuk mengerjakan semua sendiri, kita juga disamping harus bertanggungjawab dengan pekerjaan kita, kita juga harus membantu pekerjaan orang lain.”

d. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tapem Kec. Wanareja)

“ Madura, dibanding 2 tahun kebelakang sudah dalam pembenahan administrasinya, akan tetapi ya masih berjalan dengan bertahap dan pembenahan itu terus menerus. Memang madura sering terlambat karena kemaren kan banyak PR, kemudian yang baru juga sedang belajar mengikuti ritmenya ”

e. Menurut AD, (Kaur Keuangan)

“saya sendiri masih belajar karena belum lama, tapi tupoksi ya saya memahami sedikit-sedikit dan akan terus belajar untuk bisa lebih paham sehingga bisa lebih cepat dalam bekerja ”

2. Seperti apa pembagian tugas dalam pengelolaan keuangan desa di desa Madura ?

a. Menurut EN, (Sekdes Madura)

“ PPKD mengacu pada permendagri 20 th 2018. Disini Kades merupakan pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa dan Sekdes dan perangkat desa yang lain adalah Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa. Tim ini menggunakan SK Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya.

b. Menurut AD, (Kaur Keuangan Desa Madura)

“dalam SK Tim disebutkan tugas dan pokok masing-masing personil yang masuk kedalam tim PPKD.”

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ semua desa sebelum memulai tahun anggaran yang baru wajib memiliki SK PPKD, karena didalam SK tersebut merupakan dasar untuk bisa melaksanakan tugas. Perangkat desa yang terlibat atau yang masuk dalam SK PPKD wajib tahu akan tugas pokoknya sesuai dengan yang tercantum di dalam SK tersebut.”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa / PD Kecamatan Wanareja)

“ sesuai dengan aturan yang ada setiap desa wajib membuat SK PPKD, Kades sebagai Pemegang kuasa atas pengelolaan keuangan desa, sekdes dan perangkat desa yang lain adalah pelaksana pengelolaan keuangan desa. tugas perorangan sebagai pengelola keuangan desa juga dicantumkan di SK, untuk semua desa di wilayah kecamatan wanareja pasti membuat ini.”

e. Menurut Md, (pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ Sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.”

f. Menurut EW (Kaur Perencanaan dan umum)

“ dalam SK sudah diseebutkan, dan sudah sesuai dengan peraturan yang ada”

3. Bagaimanakah koordinasi antar anggota dalam tim pengelola keuangan desa dan antar kasi atau kaur di desa madura?

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Madura terdiri dari :

- Koordinator Tim adalah Sekretaris Desa Madura
- Pelaksana Kegiatan adalah Kaur dan Kasi di Desa Madura
- Pelaksana Fungsi Bendahara adalah Kaur Keuangan Desa Madura

a. Menurut EN, (Sekdes Madura)

“sekarang koordinasi dilakukan berkala, seperti setelah penetapan APBDes, saat mau pencairan DD, saat mau pelaksanaan kegiatan juga ada koordinasi, agar kegiatan bisa berjalan dengan semestinya”

b. Menurut AD, (Kaur Keuangan Desa Madura)

“ada sih koordinasi, kades, sekdes dan tim berkumpul, dan biasanya kades suka mengarahkan kegiatannya pelaksanaannya harus bagaimana, sekdes membantu mengkoordinir teman-teman anggota tim yang lain.”

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ya dijamin sekarang sarana koordinasi kan banyak bisa dari chat grup wa, tidak harus kumpul seperti rapat. Saya rasa untuk desa madura ya memang kadang untuk ber koordinasi antar sesama perangkat masih kadang ada mis, antara kades dengan sekdes atau kades dengan yang lain,

atau sekdes dengan kasi, Cuma ya harapannya ego masing-masing harus lebih diturunkan, pribadi masing-masing sudah bagus hanya kadang terkesan masih kurang koordinasi dalam pelaksanaan satu kegiatan, terkesan sendiri-sendiri.”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ Madura sudah membaik semenjak kaur perencanaan dan kaur keuangan terisi, akan tetapi masih agak sendiri-sendiri terkadang, jadi belum terlalu solid timnya, mungkin kedepan lebih instens lagi komunikasinya dan koordinasinya sehingga tidak ada mis dalam pekerjaan ”

e. Menurut Md, (Pelaksana seksi Tata Pemerintah Kecamatan Wanareja)

“ harus bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan semua lini, dengan semua pihak yang memang terkait, karena kembali lagi kita tidak bisa bekerja sendiri, kaloupun bisa hasilnya ya tidak akan maksimal ”

4. Apabila menemukan permasalahan bagaimana sistem koordinasi untuk memecahkan masalah tersebut?

a. Menurut EN, (Sekretaris Desa Madura)

“ masalah biasanya terkadang ditemui saat pelaksanaan kegiatan, apabila itu ditataran pelaksana dalam hal ini kasi/kaur,kita bicarakan di lingkup tim dengan kades juga untuk mencari akar maslahnya, dan alternatif jalan keluarnya ”

b. Menurut AD, (Kaur Keuangan Desa Madura)

“ Lapor kepada Sekdes dan Kades tentang masalah yang dihadapi”

c. Menurut EW, (Kaur perencanaan dan umum Desa Madura)

“ melaporkan masalah pada sekdes, biasanya sekdes akan melaporkan juga kepada Kades, dan nanti akan di rembug bersama solusinya”

d. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ biasanya bisa diselesaikan oleh kades selaku pimpinan tertinggi sekaligus sebagai Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa, apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan di desa, biasanya akan ada laporan ke Kecamatan, baik langsung dr sekdes, ataupun dari pendamping. Nantinya seksi Tata Pemerintahan biasanya akan berdiskusi dengan pendamping untuk pemecahan masalahnya, apabila dirasa susah untuk mengeksekusi jalan keluar permasalahan maka biasanya ini akan dibawa dulu ke

meeting struktural di Kecamatan sehingga bisa didiskusikan permasalahan dengan jabatan struktural yang lain baik itu kasi/kasubbag dan juga Sekretaris Kecamatan dan Camat selaku pimpinan wilayah. Jadi secara heirarki / bertahap tingkatan penyelesaian masalahnya.”

- e. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ berdiskusi dengan pihak yang terkait melalui jalur struktural yang sudah ada.”

- f. Menurut Md, (pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ berdiskusi dan meminta pendapat dengan yang lebih tau, mereka tidak segan untuk bercerita kepada staf sekalipun saat ke Kecamatan sehingga apabila memang bisa ditemukan solusi mereka pasti akan mendengarkan pendapat dari semua pihak, mau mendengarkan jadi agak lebih mudah untuk mendapatkan solusi dari suatu maslaah. karena mendengarkan jadi bisa ditimbang mana yang lebih baik sebagai jalan keluarnya.

Untuk aspek penggunaan/peran teknologi, Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada para narasumber sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan teknologi untuk menunjang tugas-tugas pada organisasi?

- a. Menurut EN, (Sekretaris Desa)

“ untuk teknologi terutama siskeudes madura sudah memanfaatkan dengan tambaksari, sudah kita bikin DPA juga dari situ, sistem yang lain seperti aplikasi baso juga kita sudah memanfaatkan, meski hanya beberapa kasi/kaur yang paham belum semua tahu dan bisa aplikasi kadang dibantu juga oleh kadus yang memang tau, ada 1 kadus yang paham ”

- b. Menurut AD, (Kaur Keuangan)

“ di keuangan menggunakan siskeudes, untuk perencanaan sampai dan juga sekarang CMS, sistem transfer bank”

- c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ madura termasuk desa yang aktif menggunakan teknologi, baik untuk pengelolaan keuangan desa melalui siskeudes maupun aplikasi Baso dna juga aplikasi persuratan untuk administrasi perkantoran.”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ Siskeudes juga sudah mulai melakukan transfer antar bank”

e. Menurut Md, (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ madura menggunakan teknologi dan sistem yang ada, untuk mulai merapikan administrasi juga ”

2. Apakah semua perangkat bisa menggunakan teknologi untuk membantu pelaksanaan tugasnya?

a. Menurut EN, (Sekdes)

“ untuk siskeudes sementara hanya sekdes dan Bendahara/Kaur Keuangan”

b. Menurut AD, (Kaur Keuangan)

“ untuk penggunaan teknologi, siskeudes sekdes, saya dan kaur perencanaan, untuk aplikasi lain ya sekdes bisa. Memang belum banyak yang bisa sehingga masih tergantung pada satu orang terkadang”

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ Harusnya semua tim pelaksana kegiatan bisa melakukan input terutama untuk input RAB kan banyak itu, tergantung kegiatanne dari bidang 1 sampai bidang 4. Untuk saat ini memang masih sebatas sekdes dan kaur keuangan kebanyakan dari 16 desa masih 2 orang ini cm ada beberapa yang mulai memberbantuan kaur yang membidangi perencanaan untuk melakukan input siskeudes.”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ semua anggota tim pelaksana kegiatan baik kaur atau kasi harusnya bisa melakukan input hanya di Kecamatan Wanareja tidak berjalan seperti itu, di wanareja masih kebanyakan sekdes yang melaksanakan dibantu oleh bendahara atau beberapa ada juga yang kasi kesra dna bendahara atau perencanaan ikut membantu juga”

e. Menurut Md, (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ harusnya semua bisa akan tetapi kebanyakan masih menjadi tugas sekretaris desa dan bendahara .”

f. Menurut EW, (Kaur Perencanaan dan umum)

“ untuk teknologi informasi atau aplikasi sekdes biasanya yang paham, saya sendiri memang sudah diajarkan siskeudes untuk bisa membantu input kegiatan dan srikandi untuk persuratan, pernagkat lain ya paling kaur keuangan yang tau siskeudes, dan 1 lagi ada kadus yang memang bisa IT dan diajarkan untuk bisa bantu input”

Untuk aspek Karakteristik Lingkungan Internal, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut kepada para narasumber :

1. Bagaimana cara merencanakan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di dalam organisasi?

a. Menurut EN, (Sekretaris Desa)

“ Siapa saja yang terlibat dalam pengelola keuangan sudah ditentukan jabatannya dalam aturan yang berlaku. Paling untuk merencanakan kualifikasi pernagkat ya pada saat pengisian perangkat desanya. Penentuan berhasil tidaknya seseorang menjadi seorang pernagkat desa juga ditentukan oleh hasil tes perangkat desa. dan itu semua sudah ada aturannya dan ditetapkan oleh panitia pengisian pernagkat desa. selain itu ya atas kebijakan kades. Kades bisa menentukan siapa saja yang terlibat menjadi pengelola keuangan desa tetap menjadi hak kades yang klik dengan kades ya biasanya masuk. Tapi kalo sekdes ya klik nggak klik harus masuk karena terbentur di aturan sebagai koordinatornya, tanpa sekdes pun susah untuk kades mengontrol keuangan desanya”

b. Menurut AD, (Kaur Keuangan)

“ sudah ada aturannya, dan sudah jelas ditetapkan dengan aturan, dan dikuatkan oleh SK Kades ”

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ personil yang nantinya terlibat dalam pengelolaan keuangan desa sudah disebutkan dalam permendagri nomor 20 tahun 2018, lengkap dengan tugas pokok dan fungsinya. Orang-orang tersebut tentunya disahkan

dikuatkan dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh kepala desa sebagai dasar legalitas mereka dalam menjalankan tugasnya. ”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“sudah ada aturan yang mengatur, yaitu permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. ”

e. Menurut Md, (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“Permendagri nomor 20 tahun 2018. Siapa saja yang terlibat dan tugas pokok fungsinya sudah ada, tinggal dibuatkan SK Kades tentang PPKD”.

2. Menurut anda pengelola yang ada saat ini sudah mempunyai skill yang cukup untuk posisi tersebut?

a. Menurut EN, (Sekretaris Desa)

“ berbicara skill untuk perangkat desa ya mungkin kemampuan yang berumur ya sudah bisa dibaca, bagi kasi perangkat lain yang berumur ya biasanya hanya mengandalkan pengalaman saja, skill nya ya biasa saja dan biasanya yang dimadura tidak bisa atau susah memahami sistem. Untuk yang muda bisa diajarkan teknologi, yang tua biasanya berbekal pengalaman dan harus banget biar cepat ya di bantu agar bisa cepat selese ”.

b. Menurut AD, (Kaur Keuangan)

“ perlu adanya bintek atau pelatihan, karena aturanne seringkali berubah sehingga kita juga harus update. Untuk perngkat yang lain mereka mempunyai skill ya dari pengalaman bertahun-tahun menjadi perangkat desa”.

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemeritahan Kecamatan Wanareja)

“ dari aturan yang ada sudah ditetapkan siapa yang ikut serta, tentang skill dan keahlian saya rasa semua perangkat desa apalagi di level sekdes dan kaur keuangan sebagai salah satu yang mempunyai peran banyak dalam pengelolaan keuangan sudah cukup mumpuni tinggal mereka senantiasa meng update aturan dan mengikuti instruksi yang diperikan oleh dispermades melalui Pendmapping Desa dan juga tim dari Kecamatan. Selama mengikuti bimbingan teknis dna pelatihan dengan benar dan diterapkan maka skill yang ada cukup untuk melakukan

pengelolaan keuangan desa. kecuali orang tersebut adalah orang yang tidak mudeng dnegan aturan dan keras kepala mengikuti kemaunnya sendiri maka itu tidak mungkin akan menghasilkan pengelolaan keuangan desa yang akuntable dan efesien.”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ skill yang ada cukup karena sering juga dilaksanakan bintek, pelatihan dan juga pendampingan tentang aturan yang harus dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa. ”

e. Menurut Md, (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“perangkat desa madura skill yang ada memang kebanyakan dari pengalaman karena sudah ada kasi yang sepuh, untuk yang anak mudanya baik itu sekdes dan kaur karena mengenyam pendidikan tinggi ya skill nya diatas yang kasi sudah sepuh tadi. Mungkin untuk lebih meningkatkan nggeh dengan cara pelatihan atau bintek, baik yang diselenggarakan oleh dispermades, maupun oleh Kecamatan dan Paguyuban.”

3. Bagaimana Komunikasi dilingkungan internal pengelolaan keuangan?

a. Menurut EN, (Sekretaris Desa)

“ ini yang agak menjadi PR, terkadang memang susah, pak kades sendiri kadang susah untuk diajak komunikasi, temen2 perangkat terutama yang sepuh juga agak susah, teu nyambung kadang dibawa ngobrol teh. Jadi smeentara ya masih belum lancar sekali komunikasinya, masih kadnag ada miskom, kadang masih kelihatan sorangan sorangan”

b. Menurut AD, (Kaur Keuangan)

“ kalo saya lebih sering berkomunikasi dengan sekdes, karena sekdes yang biasanya membagi pekerjaan, untuk kasi yang lain ya yang sepuh-sepuh itu harus ekstra kadang, karena aturanne sering kali berubah dan mereka lama pahamnya.”

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ Sebenarnya untuk hubungan baik secara pribadi untuk Madura baik, hanya saja memang diakui terkadang dalam pekerjaan antara sekdes dan kades tidak sejalan, sering ada miskomunikasi, sekdes mungkin berpegangan dengan aturan, kades punya kepentingan tersendiri sehingga sekdes harus menyesuaikan keinginan tersebut. Untuk pengelolaan

keuangan desa sudah lebih baik memang dari tahun tahun sebelumnya hanya memang masih ada gap dalam komunikasinya, belum klik banget”

d. Menurut Ol, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“di madura masih terkesan jalan sendiri-sendiri pernakatnya, tapi harus diakui sudah berproses ke arah yang lebih baik. Buktinya adalah SPJ atau pertanggungjawaban sudah tidak seperti dulu yang selalu masih harus dioprak-oprak dulu baru dikerjakan, sekarang dengan adanya pernakat yang muda-muda sudah lebih lancar .”

e. Menurut Md, (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ agak terkesan sendiri-sendiri dan masih kadang kurang kompak, Cuma untuk saling membantu dalam pekerjaan tetap dilakukan meski kadang yang sepuh terlambat memberitahukan bahwa pekerjaannya belum sepenuhnya kepegang sehingga yang muda pun agak terlambat meng cover pekerjaan tersebut”

Untuk aspek karakteristik Lingkungan Eksternal, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana cara komunikasi dengan perangkat di luar organisasi?

a. Menurut EN, (Sekretaris Desa)

“ berusaha menyampaikan pesan atau berkomunikasi dengan efektif dan efisien, bisa menggunakan medsos atau Hp untuk berkomunikasi dengan orang kecamatan, atau dengan perangkat lain. Lewat grup wa juga dengan sekdes lain desa, dengan organisasi lain ya bersurat.”

b. Menurut AD, (Kaur Keuangan)

“ jarang langsung dengan saya biasanya ya ke sekdes.”

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ untuk komunikasi kita bisa dengan banyak cara, lewat surat, rapat koordinasi, komunikasi langsung saat diperlukan, monitoring dan evaluasi langsung ke desa. biasanya kita berhubungan langsung dengan sekdes atau kades. Untuk komunikasi biasanya dilakukan berjenjang, dan selama ini lancar dalam komunikasi, tidak susah karena apabila ada mis atau bukan itu yang dimaksud kita biasanya langsung kontak secara personal baik ke kades atau sekdes. Intinya selalu ada yang bisa kita hubungi saat

ada keperluan yang mendesak dan informasi tersebut sampai kepada yang dituju dan maksud dari komunikasi tersampaikan dengan tepat”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ biasanya komunikasi dengan saya ya lewat Wa atau telepon, dengan kecamatan ya mereka ke kecamatan atau via telepon, setahu saya si begitu”

e. Menurut Md , (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ kalo untuk sebatas menitipkan pesan mudah, jarak dari kantor kecamatan ke madura juga dekat sehingga mudah saja menitipkan pesan atau lewat telepon”

3. Bagaimana pembagian disposisi jika ada perintah / disposisi dari luar organisasi ?

a. Menurut EN, (Sekretaris Desa)

“ disposisi dari luar biasanya melalui pak kades, saya tau informasi itu dari kades, ada sih satu dua yang langsung ke saya apabila kades sedang susah dihubungi nanti kemudian saya sampaikan kades”

b. Menurut AD, (Kaur Keuangan)

“ disposisi dari luar biasanya via telepon dan ke kades biasanya , walaupun ke bu sekdes nanti ibu akan menyampaikan ke kades dl baru eksekusi tindaklanjutnya seperti apa”

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“disposisi biasanya kita bersurat ke desa, atau kalo itu mendesak dilakukan via telp ke kades, atau sekdes. Untuk madura komunikasi dengan kades dan sekdes lancar. Tapi ada desa yang kita harus telp ke sekdesnya juga karena kadesnya nggak dong dengan maksud dari disposisi yang kita minta, atau kadesnya biasanya bilang telp aja pak sekdes biar cepet, biasane ada yang begitu.”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ langsung ke kades/sekdes kita tinggal berkoordinasi tentang tindak lanjutnya saja.”

e. Menurut Md , (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ relatif gampang menyampaikan pesan lewat sekdes via telepon, bu kasi nanti berinfo juga ke pak kades biasanya begitu”

Untuk aspek Karakteristik Personal, diajukan pertanyaan sebagai berikut :

3. Bagaimana jika terjadi masalah pada masing-masing personil ?

a. Menurut EN, (Sekretaris Desa)

“ harus diselesaikan biar tidak mengganggu pekerjaan, biasanya sih sebisa mungkin diajak curhat dulu, biar kita tahu harus bagaimana, kalo memang kita tidak bisa membantu ya mau tidak mau kita bicara kepada yang bersangkutan kalau harus diingat adalah tanggung jawabnya harus selesai, apabila sampai dengan hampir mendekati dealline pekerjaan tidak beres ya diambil alih saja pekerjaan oleh yang lain untuk bisa selesai”

b. Menurut AD, (Kaur Keuangan)

“ diselesaikan agar tidak mengganggu selesainya pekerjaan.”

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemeirntahan Kecamatan Wanareja)

“ berusaha untuk diselesaikan, pribadi orang kan bermacam-macam sudut pandang juga kadang berbeda sehingga wajar apabila ada perbedaan pendapat, tapi hendaknya ini tidak menjadi debat kusir bekepanjangan dan menjadi permasalahan yang mengganggu pekerjaan, sehingg apabila ditemukan benturan ya seyogyanya di rembug bersama antara yang bermasalah untuk bisa diselesaikan masalahnya. Demi situasi yang kondusif karena bagaimanapun situasi lingkungan pekerjaan yang kondusif akan membawa pikiran positif untuk bisa memacu kita berkomunikasi dengan baik dan pekerjaan akan menjadi lebih mudah dan lebih ringan tentunya”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ biasanya apabila ada masalah ya harus diselesaikan agar tidak berimbas ke pekerjaan”

e. Menurut Md , (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“kalau masalah yang sangat serius sampai berpengaruh kepada kinerja biasanya akan didudukkan, kades atau sekdes boleh karena mereka mempunyai kekuasaan untuk itu, tapi samapai sekarang sih hampir semua masalah yang timbul bisa diselesaikan dengan baik”

4. Bagaimana cara mengatasi perbedaan sikap/pandangan dalam mengatasi masalah organisasi?

a. Menurut EN, (Sekretaris Desa Tambaksari)

“dirembug bersama duduk bersama masing-masing mnegemukakan pendapat/pandnagan agar masalah tersebut selesai, apabila tidak ada titik temu dan masih belum terselesaikan biasanya pak kades akan bercerita juga ke pak camat melalui kasi yang membidangi, nanti dari kecamatan biasanya turun untuk memberi arahan bagaimana menangani hal tersebut”

b. Menurut AD, (Kaur Keuangan)

“ bermusyawarah untuk mencari jalan keluar terbaik bagi organisasi”

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemeirntahan Kecamatan Wanareja)

“ satu kata dan kades bisa menyatukan visi dan pendapatnya, kades hendaknya bisa memanaj semua perngkat yang ada dibawahnya. Karena kades merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sehingga dia bisa mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ kades bisa menjadi penengah dan pembuat keputusan akhir apabila terdapat perbedaan pendapat antar personil mengingat kades merupakan pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa”

e. Menurut Md , (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“kades bisa membuat keputusan mana yang pendapat yang bisa dipakai untuk melakukan pekerjaan, jalan mana yang harus ditempuh untuk menyelesaikan suatu masalah. Eksekusi terakhir ada pada kebijakan kepala desa.”

Dalam aspek kebijakan manajemen, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pimpinan dalam organisasi ?

a. Menurut EN, (Sekretaris Desa)

“ kebijakan pimpinan dalam hal ini berarti kebijakan kades, ya mau tidak mau kebijakannya harus diikuti, karena kades punya kekuasaan. Semisal

pembangunan jalan di Rw a harusnya setelah di triwulan 3 atau setelag lebaran, tapi kades mnta dimajukan sebelum puasa ya mau tidak mau kegiatan yang lain di lokir, untuk meng akomodir keg yang ini”.

b. Menurut AD, (Kaur Keuangan)

“ mau tidak mau kan kebijakan itu harus dilaksanakan, kita sebagai bawahan hanya bisa melaksanakan saja”

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemeirntahan Kecamatan Wanareja)

“kebijakan kades tentunya masing-masing desa tidak sama, akan tetapi selama ini kebijakan kades ya tidak ada yang protes karena ya sudah menjadi konsekuensi perangkat pasti menjalankan kebijakan tersebut, sepanjang semua disetujui oleh BPD, dan untuk masyarakat ya pasti akan dilaksanakan. seandainya ada yang tidak setuju dengan kebijakan kades pun, biasanya itu akan tetap dilaksanakan sepanjang tidak menentang hukum dan hanya perorangan yang tidak setuju ya tetap berjalan. Kenapa karena kepala desa mempunyai legitimasi tersendiri, kades dipilih oleh masyarakat sendiri, sehingga misal kebijakan terlalu menguntungkan satu pihak pendukungnya juga tidak akan terlalu dimasalahkan. Sampai saat ini sih kebijakan masih wajar, dan bisa dipahami oleh semua unsur baik masyarakat, perngkat dan juga tomasnya.”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ setiap kebijakan ya harus dilaksanakan karena itu keputusan kades, perangkat desa hanya menjalankan isntruksi dari kades, sepenuhnya kebijakan ya tanggung jawab kades ”

e. Menurut Md , (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“perangkat hanya menjalankan kebijakan pimpinan. Kades mestinya dalam mengambil suatu kebijakan sudah mempertimbangkan banyak hal.”

4. Apakah memicu peningkatan prestasi pada anggota organisasi?

a. Menurut EN, (Sekretaris Desa)

“ untuk prestasi kerja sebenarnya tidak akan berpengaruh karena tidak ada ukuran prestasi kerja pada perangkat desa”

b. Menurut AD, (Kaur Keuangan)

“ tidak ada pengaruhnya secara individu”

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemeirntahan Kecamatan Wanareja)

“ agak susah untuk perangkat desa berprestasi, karena berprestasi atau tidak , bagi perngkat desa tidak ada ukurannya. Kinerja mereka kan tidak ada penilaiannya. Berbeda dengan PNS yang ada sasaran kinerja pegawai bisa diukur sejauh mana prestasi kerjanya. Kalo perangkat desa berbeda. Ada dan tidak ada prestasi juga sama tidka mempengaruhi siltap yang diberikan.”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“sepertinya tidak berpengaruh, tidak ada hubungannya dengan prestasi perangkat desa”

e. Menurut Md , (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ tidak ada sepertinya ”

f. Bagaimana cara pimpinan merespon konflik antar anggota?

f. Menurut EN, (Sekretaris Desa)

“ merespon konflik ya biasanya diriungkan semua yang berkonflik, ditanya sebab musababnya, ditengahi dan diberikan pencerahan keadaan yang sebenarnya dan seharusnya biar semua paham posisi dan letak kepentinganya, sehingga diharapkan konflik bisa didamaikan”

g. Menurut AD, (Kaur Keuangan)

“ dikumpulkan semua yang berkonflik perngkat yang dituakan jg, diberikan pandangan masalahnya kalo berkepanjangan akan seperti apa, ditengahi dan bersama-sama mendiskusikan jalan keluar yang aman tanpa memihak”

h. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemeirntahan Kecamatan Wanareja)

“ menjadi penengah, dan memastikan konflik selesai tidak berkepanjangan”

i. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ mengayomi, menjadi penengah agar konflik selesai, duduk bersama mencari solusi dari masalah”

j. Menurut Md , (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ kalo sama kades biasane manut, jadi ya kades harus bisa menjadi juru damai, mencari solusi dan memastikan apabila hal-hal seperti itu jangan sampai terulang lagi dimasa yang akan datang”

Secara keseluruhan Camat Wanareja, IA juga menyampaikan pandangannya terhadap semua aspek efektifitas yang ada di Desa Madura, sebagai berikut :

“ Madura desa yang unik ya dari segi sosio kultural juga, daerah yang berbatasan langsung dengan propinsi jawa barat. Secara adat dan budaya juga sudah berbeda dengan desa yang sebelah timur. Perangkat Desanya kebanyakan juga memang sudah berumur, dan saat saya datang kesini menjadi Camat Wanareja di bulan agustus tahun 2022, Madura dalam segi administrasi cukup tertinggal dengan beberapa desa yang lain seperti tambaksari, dan limbangan contohnya. Saat ini progresnya sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, ya masih kelihatan belum kompak ya, masih terkesan kadang ada mis, akan tetapi 3 perangkat yang muda ini sekdes dan dua kaur ini sepertinya mempunyai potensi untuk lebih baik lagi kedepannya. Dengan koordinasi yang semakin rapi, dna nantinya juga tidak lama lagi pastinya ada pengisian perangkat yang baru mungkin akan lebih baik lagi. Selama ini Kecamatan juga cukup terbuka untuk menerima aduan dan juga kita tidak berhenti untuk terus mendampingi dan mengarahkan desa untuk lebih baik lagi secara administrasi dan juga memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.”

Desa ketiga atau desa terakhir yang menjadi Lokus sample penelitian adalah Desa Sidamulya, baru berdiri di tahun 1990an merupakan pemekaran dari Desa Wanareja. Desa ini unik karena sebagian besar penduduknya bertutur dengan bahasa jawa kromo khas Yogyakarta, bukan Jawa Ngoko Ngapak khas banyumasan. Hal ini disebabkan yang membuka desa ini pertama kalinya pada tahun 1936 adalah penduduk koloni dari daerah kulon progo dan sleman. Mereka menjadi cikal bakal penduduk sidamulya dan membawa serta budaya dan bahasa daerah mataram saat itu, sehingga meskipun berbatasan langsung dengan jawa barat mereka tetap menjunjung tinggi adat, budaya dan bahasa jawa halus tersebut. Disebelah selatan berbatasan dengan Sungai Citanduy, dna jembatan

gantung yang menghubungkan langsung dengan Kota Banjar yaitu wilayah Langgensari. Di bagian barat berbatasan dengan Desa Madura, disebelah Timur berbatasan dengan Desa Adimulya, dan di sebelah utara dengan Desa Wanareja. Berjarak 4 Km dari pusat Pemerintahan Kecamatan, dengan jumlah penduduk 7.958 jiwa atau 2.551 KK, mempunyai luas wilayah 615,9 Ha, dan merupakan salah satu Desa yang rawan dengan bencana banjir, mengingat disamping berbatasan langsung juga masuk didalam daerah aliran sungai salah satu sungai terpanjang yang membelah jawa bagian selatan yaitu Sungai Citanduy (profil desa Sidamulya). Berdasarkan Profil Desa dan Kelurahan Desa Sidamulya mempunyai status Desa Swakarya, yaitu desa yang mempunyai 2 urusan dan 3 seksi. Susunan Perangkat Desa di Desa Sidamulya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa (Kades)
2. Sekretaris Desa (Sekdes)
3. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan (Kaur Umum dan Perencanaan)
4. Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan)
5. Kepala Seksi Pemerintahan (Kasi Pemerintahan)
6. Kepala Seksi Pelayanan (Kasi Pelayanan)
7. Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra)
8. Staf Kasi dan Kaur
9. Kepala Dusun (Kadus) Rejasari
10. Kepala Dusun (Kadus) Rejamulya
11. Kepala Dusun (Kadus) Sidadadi
12. Kepala Dusun (Kadus) Bakung

13. Kepala Dusun (Kadus) Mekarsari
14. Kepala Dusun (Kadus) Margosari
15. Kepala Dusun (Kadus) Margodadi
16. Kepala Dusun (Kadus) Cibeureum

Sumber daya manusia organisasi atau perangkat desa Sidamulya dari 16 orang hanya ada 3 orang yang ada beberapa orang yang mengenyam pendidikan tinggi, kebanyakan masih sebatas lulusan setingkat Pendidikan Menengah dan Dasar. Berikut adalah data perangkat Desa Sidamulya.

Tabel 4.5.

Data Perangkat Desa Sidamulya

No	Nama Jabatan	Pendidikan	Usia
1	Kepala Desa	SLTA	62 Tahun
2	Sekretaris Desa	Sarjana	40 Tahun
3	Kaur Umum dan Perencanaan	SLTA	40 Tahun
4	Kaur Keuangan	Sarjana	57 Tahun
5	Kasi Pemerintahan	SLTA	48 Tahun
6	Kasi Pelayanan	SLTA	59 Tahun
7	Kasi Kesejahteraan	SLTA	59 Tahun
8	Staf Kasi Pemerintahan	SLTA	51 Tahun
9	Kadus Rejasari	SLTP	54 Tahun
10	Kadus Rejamulya	SLTA	37 Tahun
11	Kadus Sidadadi	SLTA	53 Tahun
12	Kadus Bakung	SLTA	52 Tahun
13	Kadus Mekarsari	SLTA	41 Tahun

No	Nama Jabatan	Pendidikan	Usia
14	Kadus Margosari	Diploma 3	31 Tahun
15	Kadus Margodadi	SD	59 Tahun
16	Kadus Cibeureum	SLTA	36 Tahun

Sumber Data : Data Perangkat Desa dari Seksi Tata Pemerintahan Kec. Wanareja

Berdasarkan data diatas ada 3 orang yang usianya mendekati usia pensiun, tentunya ini juga berpengaruh kepada kinerja organisasi. Dari data awal monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim Kecamatan Wanareja, pada tahun 2023 Sidamulya banyak terlambat dalam penyelesaian administrasi penatausahaan dan pertanggungjawabannya.

Aspek Karakteristik Struktur Organisasi, Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Responden atau narasumber. Narasumber yang ditanya oleh peneliti adalah Perangkat desa dari desa sample, Pendamping Desa, Kasi dan Pelaksana di Seksi Tata Pemerintahan serta Camat Wanareja.

1. Apakah masing-masing perangkat desa mengetahui Tugas Pokok dan Fungsinya baik tugas pokok dan fungsi sesuai nomenklatur jabatannya maupun tugas pokok dan fungsi dalam Tim PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa).
 - a. Menurut ES, (Sekdes Sidamulya)

“ Tupoksi sesuai dengan Sk Kades, masing-masing sudah paham sebenarnya tentang tupoksi masing-masing, akan tetapi ya seperti itu, karena ada beberapa perangkat yang memang sepuh dan memang tidak bisa melaksanakan tugas dengan cepat karena keterbatasan pengetahuan ya mereka biasanya minta bantuan ke yang lebih muda. Dan terus terang saya selaku koordinator ya mau tidka mau juga tidak hanya membagi tugas tapi juga ikut mengerjakan agar bisa selesai semua” ”.

b. Menurut OL, (Pendamping Desa)

“ untuk perangkat Desa Sidamulya tentang tupoksi ya semua sudah paham akan tetapi genah keterbatasan dan faktor usia sehingga ya banyak dibantu dan ditanggung oleh perangkat yang muda. Sekdes berperan sangat banyak disini, dan hanya ada 1 kasi dan 1 kaur yang saya pandang mampu cepat menyelesaikan tugas, kemudian beralih membantu yang lain. Kaur keuangan selaku bendahara desa pun harus selalu di komandoi oleh sekdes, karena kalo sendiri kadang banyak salahnya, meskipun sudah lama menjadi bendahara tapi ya begitu lelet, mungkin juga faktor usia ”

c. Menurut EL, (Kaur Perencanaan dan Umum)

“ sebisa mungkin saya membantu pak sekdes, bekerjasama dengan mas IG kasi pemerintahan untuk bisa mengcover 2 kasi yang lain dalam menjalankan tugasnya, karena beliau berdua sudah sepuh dan kita juga menyadari keterbatasan beliau berdua tentang teknologi”

d. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tapem Kec. Wanareja)

“ untuk Sidamulya, sebenarnya lumayan tertib , sekdes bisa mengcover kekurangan yang ada, hanya memang karena hanya mengandalkan 2 orang saja ditambah dengan sekdes sendiri, ya mau tidak mau memang agak terlambat ”

e. Menurut Yy, (Kaur Keuangan)

“ ya terus terang saya banyak sekali dibantu pak sekdes, karena kadang bingung ”

f. Menurut IG, (Kasi Pemerintahan)

“ sebenarnya tanggung jawab saya didalam SK kan hanya pengelola kegiatan saja, akan tetapi kenyataannya ya saya ikut juga merencanakan dan membebereskan pertanggungjawabannya membantu tugas bendahara, karena kalo mengandalkan bendahara ya lama, kasian pak sekdes juga bekerja sendiri, makanya ya saya membantu beliau agar semua selesai semaksimal mungkin, dan sering terlambat iya, tapi kita selalu berusaha untuk sesuai prosedur”

2. Seperti apa pembagian tugas dalam pengelolaan keuangan desa di desa Sidamulya ?

a. Menurut ES, (Sekdes)

“ Pembagian tugas PPKD mengacu pada permendagri 20 th 2018. Disini Kades merupakan pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa dan Sekdes dan perangkat desa yang lain adalah Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa. Tim dikukuhkan dengan SK Kades”

b. Menurut Yy, (Kaur Keuangan)

“ sesuai SK Tugasnya ”

c. Menurut EL, (Kaur Umum dan Perencanaan)

“ pembagian tugasnya nggeh seperti yang ada dalam SK Kades, Pak Kades Pemegang Kuasa, Pak Sekdes Koordinator, perangkat yang lain pelaksana”

d. Menurut IG, (Kasi Pemerintahan)

“ sesuai dengan peraturan yang dituangkan di SK Kades ”

e. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ semua desa sebelum memulai tahun anggaran yang baru wajib memiliki SK PPKD, karena didalam SK tersebut merupakan dasar untuk bisa melaksanakan tugas. Perangkat desa yang terlibat atau yang masuk dalam SK PPKD wajib tahu akan tugas pokoknya sesuai dengan yang tercantum di dalam SK tersebut.”

f. Menurut OL, (Pendamping Desa / PD Kecamatan Wanareja)

“ sesuai dengan aturan yang ada setiap desa wajib membuat SK PPKD, Kades sebagai Pemegang kuasa atas pengelolaan keuangan desa, sekdes dan perangkat desa yang lain adalah pelaksana pengelolaan keuangan desa. tugas perorangan sebagai pengelola keuangan desa juga dicantumkan di SK, untuk semua desa di wilayah kecamatan wanareja pasti membuat ini.”

g. Menurut Md, (pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ Sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.”

3. Bagaimanakah koordinasi antar anggota dalam tim pengelola keuangan desa dan antar kasi atau kaur di desa sidamulya?

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Sidamulya terdiri dari :

- Koordinator Tim adalah Sekretaris Desa Sidamulya
- Pelaksana Kegiatan adalah Kaur dan Kasi di Desa Sidamulya
- Pelaksana Fungsi Bendahara adalah Kaur Keuangan Desa Sidamulya

- a. Menurut ES, (Sekdes)

“Koordinasi selalu dilakukan, kalo sudah musimnya kegiatan dilaksanakan ya hampir tiap hari kita membicarakan progres kegiatan sampai mana, untuk evaluasi ya kadang saat ada yang urgent dan mendesak kita harus kumpul semua termasuk dengan kades ya kita bahas bersama progres dan kendalanya”

- b. Menurut IG, (Kasi Pemerintahan)

“ mungkin hampir tiap hari ya saat pelaksanaan kegiatan, situasional kalo butuh berkoordinasi ya kita koordinasi karena kalo tidak gimana dengan pelaksanaan kegiatannya”

- c. Menurut EL, (Kaur Umum dan Perencanaan)

“ tergantung kebutuhan , koordinasi kan bisa dilakukan dalam bentuk apa saja tidak harus formal rapat, saya rasa saat memang kita butuh berkoordinasi untuk pekerjaan ya kita lakukan meskipun itu melalui telpon misalnya, kita lakukan”

- d. Menurut Yy, (Kaur Keuangan)

“ koordinasi dengan pak kades pak sekdes dan rekan-rekan yang lain ya dilakukan, kan biar cepet selesai pekerjaannya”

- e. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ya dijamin sekarang sarana koordinasi kan banyak bisa dari chat grup wa, tidak harus kumpul seperti rapat. Desa Sidamulya, pak sekdesnya bisa meng cover staf yang lain. Enak koordinasinya, pak sekdes juga bukan ornag yang kaku, pak kades meskipun sudah sepuh karena pengalaman beliau jadi kades sudah beberapa kali ya enak mudeng kalau diajak koordinasi”

f. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ Desa Sidamulya lumayan, meski sepuh-sepuh tapi untuk koordinasi bisa lah, meskipun kalo dengan yang sepuh seperti kasi kesra ya harus lumayan menjelaskannya tapi beliau lumayan mudeng ”

g. Menurut Md, (Pelaksana seksi Tata Pemerintah Kecamatan Wanareja)

“ harus bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan semua lini, dengan semua pihak yang memang terkait, karena kembali lagi kita tidak bisa bekerja sendiri, kaloupun bisa hasilnya ya tidak akan maksimal ”

4. Apabila menemukan permasalahan bagaimana sistem koordinasi untuk memecahkan masalah tersebut?

a. Menurut ES, (Sekretaris Desa)

“ dipecahkan bersama , biasanya ya saya dan rekan-rekan kaur dan kasi ngobrol ini harus dihadapi seperti apa, dicari jalan keluarnya. Kalo seandainya buntu nggeh ke pak kades, matur seperti apa dan memberikan alternatif solusi yang kita pikirkan setuju apa pak kades punya pandangan lain. ”

b. Menurut IG, (Kasi Pemerintahan)

“ bicara dengan sekdes dan nantinya ke kades juga, di rembug bareng solusinya mau seperti apa”

c. Menurut EL, (Kaur Umum dan Perencanaan)

“ berbicara dengan perangkat yang lain, lapor kepada Kades dan Sekdes”

d. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ biasanya bisa diselesaikan oleh kades selaku pimpinan tertinggi sekaligus sebagai Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa, apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan di desa, biasanya akan ada laporan ke Kecamatan, baik langsung dr sekdes, ataupun dari pendamping. Nantinya seksi Tata Pemerintahan biasanya akan berdiskusi dengan pendamping untuk pemecahan masalahnya, apabila dirasa susah untuk mengeksekusi jalan keluar permasalahan maka biasanya ini akan dibawa dulu ke meeting struktural di Kecamatan sehingga bisa didiskusikan permasalahan dengan jabatan struktural yang lain baik itu kasi/kasubbag dan juga

Sekretaris Kecamatan dan Camat selaku pimpinan wilayah. Jadi secara heirarki / bertahap tingkatan penyelesaian masalahnya.”

- e. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ berdiskusi dengan pihak yang terkait melalui jalur struktural yang sudah ada.”

- f. Menurut Md, (pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ berdiskusi dan meminta pendapat dengan yang lebih tau, mereka tidak segan untuk bercerita kepada staf sekalipun saat ke Kecamatan sehingga apabila memang bisa ditemukan solusi mereka pasti akan mendengarkan pendapat dari semua pihak, mau mendengarkan jadi agak lebih mudah untuk mendapatkan solusi dari suatu maslaah. karena mendengarkan jadi bisa ditimbang mana yang lebih baik sebagai jalan keluarnya.

Untuk aspek penggunaan/peran teknologi, Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada para narasumber sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan teknologi untuk menunjang tugas-tugas pada organisasi?

- a. Menurut ES, (Sekretaris Desa)

“ Teknologi saat ini sudah harus digunakan untuk mempercepat pekerjaan, saya sendiri ya memegang sisekudes dari sistem itu mulai dikenalkan kepada Desa, untuk srikandi juga kita gunakan meskipun belum semua surat menggunakan srikandi. Untuk desa sidamulya sendiri siskeudes biasanya saya dibantu kasi pemerintahan ”

- b. Menurut Yy, (Kaur Keuangan)

“ siskeudes nggeh biasane pak sekdes, tranfer antar bank juga saya minta bantuan pak sekdes, mbok saya salah, soalnya suka lupa tahapannya, atau paling juga minta bantuan kaur umum atau kasi pemerintahan”

- c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ Sidamulya termasuk desa yang aktif menggunakan teknologi, baik untuk pengelolaan keuangan desa melalui siskeudes maupun aplikasi Baso dna juga aplikasi persuratan untuk administrasi perkantoran.”

- d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)
 - “ Siskeudes juga sudah mulai melakukan transfer antar bank”
 - e. Menurut Md, (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)
 - “ Sidamulya sudah menggunakan aplikasi yang ada ”
3. Apakah semua perangkat bisa menggunakan teknologi untuk membantu pelaksanaan tugasnya?
- a. Menurut ES, (Sekdes)
 - “ untuk siskeudes saya biasanya, bendahara dan kasi pemerintahan kadang kadang”
 - b. Menurut Yy, (Kaur Keuangan)
 - “ siskeudes nggeh pak sekdes, saya bantu saja”
 - c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)
 - “ Harusnya semua tim pelaksana kegiatan bisa melakukan input terutama untuk input RAB kan banyak itu, tergantung kegiatanne dari bidang 1 sampai bidang 4. Untuk saat ini memang masih sebatas sekdes dan kaur keuangan kebanyakan dari 16 desa masih 2 orang ini cm ada beberapa yang mulai memberbantuan kaur yang membidangi perencanaan untuk melakukan input siskeudes.”
 - d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)
 - “ semua anggota tim pelaksana kegiatan baik kaur atau kasi harusnya bisa melakukan input hanya di Kecamatan Wanareja tidak berjalan seperti itu, di wanareja masih kebanyakan sekdes yang melaksanakan dibantu oleh bendahara atau beberapa ada juga yang kasi kesra, kasi pemerintahan atau perencanaan ikut membantu juga”
 - e. Menurut Md, (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)
 - “ harusnya semua bisa akan tetapi kebanyakan masih menjadi tugas sekretaris desa dan bendahara .”

Untuk aspek Karakteristik Lingkungan Internal, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut kepada para narasumber :

1. Bagaimana cara merencanakan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di dalam organisasi?

a. Menurut ES, (Sekretaris Desa)

“ untuk pengelola keuangan sudah ditentukan siapa dan jabatannya apa dalam aturan yang berlaku. Untuk merencanakan kedepan mungkin siapa yang terlibat ya seandainya ada kekosongan perangkat kita bisa berharap yang muda yang bisa lebih mempunyai skill dan kemampuan administrasi yang baik ”

b. Menurut Yy, (Kaur Keuangan)

“ Kan sudah ada aturannya, pak sekdes tinggal buat SKnya ”

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ personil yang nantinya terlibat dalam pengelolaan keuangan desa sudah disebutkan dalam permendagri nomor 20 tahun 2018, lengkap dengan tugas pokok dan fungsinya. Orang-orang tersebut tentunya disahkan dikuatkan dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh kepala desa sebagai dasar legalitas mereka dalam menjalankan tugasnya. ”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“sudah ada aturan yang mengatur, yaitu permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. ”

e. Menurut Md, (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“Permendagri nomor 20 tahun 2018. Siapa saja yang terlibat dan tugas pokok fungsinya sudah ada, tinggal dibuatkan SK Kades tentang PPKD”.

2. Menurut anda pengelola yang ada saat ini sudah mempunyai skill yang cukup untuk posisi tersebut?

a. Menurut ES, (Sekretaris Desa)

“ untuk posisi pengelola yang ada di SK PPKD ya, selain saya ada 2 mungkin yang bisa dibilang mempunyai skill yang mendukung diposisi itu, untuk yang sepuh-sepuh ya skill ada, karena mereka mempunyai pengalaman akan tetapi regulasi sekarang kan sudah beda ya, terkadang yang biasa bagi mereka terkadang sudah tidak bisa digunakan lagi saat ini ”.

b. Menurut IG, (Kasi Pemerintahan)

“ Skill bisa diperoleh dari bintek dan pelatihan, karena kita dapat ilmu baru dari situ, kalo kemampuan kita sih ya standar aja saya rasa kalo perangkat desa ya minimalnya seperti ini”.

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ dari aturan yang ada sudah ditetapkan siapa yang ikut serta, tentang skill dan keahlian saya rasa semua perangkat desa apalagi di level sekdes dan kaur keuangan sebagai salah satu yang mempunyai peran banyak dalam pengelolaan keuangan sudah cukup mumpuni tinggal mereka senantiasa meng update aturan dan mengikuti instruksi yang diperikan oleh dispermades melalui Pendmapping Desa dan juga tim dari Kecamatan. Selama mengikuti bimbingan teknis dna pelatihan dengan benar dan diterapkan maka skill yang ada cukup untuk melakukan pengelolaan keuangan desa. kecuali orang tersebut adalah orang yang tidak mudeng dnegan aturan dan keras kepala mengikuti kemaunnya sendiri maka itu tidak mungkin akan menghasilkan pengelolaan keuangan desa yang akuntable dan efesien.”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ skill yang ada cukup karena sering juga dilaksanakan bintek, pelatihan dan juga pendampingan tentang aturan yang harus dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa. ”

e. Menurut Md, (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ sebenarnya untuk mempunyai skill bagi pernagkat desa itu dari pengalaman, dan juga dari bintek kalo yang rajin ikut bimtek dan ngatekke ya sak jane bisa, Cuma ya itu ada kemauan itu berubah apa tidak dari dirinya sendiri, ada motivasinya apa tidak.”

3. Bagaimana Komunikasi dilingkungan internal pengelolaan keuangan?

a. Menurut ES, (Sekretaris Desa)

“ Komunikasi utama dalam berhubungan dengan orang lain, tanpa komunikasi kan susah kita untuk menyampaikan sesuatu, untuk tim sidamulya sih cukup bagus dalam komunikasi, pak kades meski sepuh juga ya komunikasi tetap bisa berjalan walau kadang harus sabar menyampaikannya”

b. Menurut IG, (Kasi Pemerintahan)

“ sekdes dan temen-teman perangkat yang lain mudah diajak komunikasi kok, satu visi harus biar cara pandang dalam masalah sama.”

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ Sebenarnya untuk hubungan baik secara pribadi untuk Sidamulya baik, meskipun ya hanya beberapa orang saja dalam tim yang memang bekerja keras , yang lainnya hanya sebagai pendukung tapi support dengan pekerjaannya”

d. Menurut Ol, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“Sidamulya bagus, meskipun ya tidak secepat desa yang lain, ayem .”

e. Menurut Md, (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ sidamulya anteng, alon-alon tapi kelakon”

Untuk aspek karakteristik Lingkungan Eksternal, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana cara komunikasi dengan perangkat di luar organisasi?

a. Menurut ES, (Sekretaris Desa)

“ Via telepon atau wa pun insyaallah bisa tersampaikan pesannya apa, hanya untuk lebih tertibnya kita biasa menggunakan surat resmi juga, seperti misalnya meminta dari TP PKK Kecamatan sebagai Narasumber atau dari Kecamatan menjadi Narasumber kita bersurat resmi”

b. Menurut IG, (Kaur Pemerintahan)

“ Pak Kades atau pak sekdes biasanya”

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ untuk komunikasi kita bisa dengan banyak cara, lewat surat, rapat koordinasi, komunikasi langsung saat diperlukan, monitoring dan evaluasi langsung ke desa. biasanya kita berhubungan langsung dengan sekdes atau kades. Untuk komunikasi biasanya dilakukan berjenjang, dan selama ini lancar dalam komunikasi, tidak susah karena apabila ada mis atau bukan itu yang dimaksud kita biasanya langsung kontak secara personal baik ke kades atau sekdes. Intinya selalu ada yang bisa kita hubungi saat ada keperluan yang mendesak dan informasi tersebut sampai kepada yang dituju dan maksud dari komunikasi tersampaikan dengan tepat”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ biasanya komunikasi dengan saya ya lewat Wa atau telepon, dengan kecamatan ya mereka ke kecamatan atau via telepon, setahu saya si begitu”

e. Menurut Md , (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ kalo untuk sebatas menitipkan pesan mudah, jarak dari kantor kecamatan ke madura juga dekat sehingga mudah saja menitipkan pesan atau lewat telepon”

2. Bagaimana pembagian disposisi jika ada perintah / disposisi dari luar organisasi ?

a. Menurut ES, (Sekretaris Desa)

“ Disposisi dari luar kan berarti perintah nggeh dari Kecamatan biasanya, apabila ada permintaan dari kecamatan seandainya harus segera dan itu administratif saya bisa langsung bagi tugas tapi kalo ada unsur kebijakan didalamnya saya sampekan kepada pak kades dulu, nanti beliau akan memutuskan seperti apa kita tinggal tindak lanjut”

b. Menurut IG, (Kasi Pemerintahan)

“ Biasanya kalo saya terima disposisinya sudah dari pak sekdes, pak sekdes dari pak kades”

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemeirntahan Kecamatan Wanareja)

“disposisi biasanya kita bersurat ke desa, atau kalo itu mendesak dilakukan via telp ke kades, atau sekdes. Untuk madura komunikasi dengan kades dan sekdes lancar. Tapi ada desa yang kita harus telp ke sekdesnya juga karena kadesnya nggak dong dengan maksud dari disposisi yang kita

minta, atau kadesnya biasanya bilang telp aja pak sekdes biar cepet, biasane ada yang begitu.”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ langsung ke kades/sekdes kita tinggal berkoordinasi tentang tindak lanjutnya saja.”

e. Menurut Md , (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ relatif gampang menyampaikan pesan lewat sekdes via telepon, bu kasi nanti berinfo juga ke pak kades biasanya begitu”

Untuk aspek Karakteristik Personal, diajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana jika terjadi masalah pada masing-masing personil ?

a. Menurut ES, (Sekretaris Desa)

“ tergantung masalahnya apa? Terhubung dengan pekerjaan atau masalah antar pribadi diluar pekerjaan, apabila itu adalah masalah pekerjaan ya sebisa mungkin kita duduk bersama dirembug baiknya seperti apa, apabila masalah pribadi ya mungkin sebatas mengingatkan untuk tidak mengganggu pekerjaan dan tetap bertanggungjawab kepada pekerjaan”

b. Menurut IG, (Kasi Pemeirntahan)

“ ya diselesaikan sebelum menjadi berlarut-larut.”

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemeirntahan Kecamatan Wanareja)

“ berusaha untuk diselesaikan, pribadi orang kan bermacam-macam sudut pandang juga kadang berbeda sehingga wajar apabila ada perbedaan pendapat, tapi hendaknya ini tidak menjadi debat kusir bekepanjangan dan menjadi permasalahan yang mengganggu pekerjaan, sehingg apabila ditemukan benturan ya seyogyanya di rembug bersama antara yang bermasalah untuk bisa diselesaikan masalahnya. Demi situasi yang kondusif karena bagaimanapun situasi lingkungan pekerjaan yang kondusif akan membawa pikiran positif untuk bisa memacu kita berkomunikasi dengan baik dan pekerjaan akan menjadi lebih mudah dan lebih ringan tentunya”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ biasanya apabila ada masalah ya harus diselesaikan agar tidak berimbas ke pekerjaan”

- e. Menurut Md , (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“kalau masalah yang sangat serius sampai berpengaruh kepada kinerja biasanya akan didudukkan, kades atau sekdes boleh karena mereka mempunyai kekuasaan untuk itu, tapi samapai sekarang sih hampir semua masalah yang timbul bisa diselesaikan dengan baik”

2. Bagaimana cara mengatasi perbedaan sikap/pandangan dalam mengatasi masalah organisasi?

- a. Menurut ES, (Sekretaris Desa)

“duduk bersama mencari solusi terbaik, seandainya tidak terselesaikan oleh kades ya mungkin karena ini pekerjaan ya dengan yang lebih berwenang diatasnya lagi. Contoh kasus BUMDes, Kades tidak bisa menyelesaikan, Kecamatan juga minta langsung bantuan ke Dispermades melalui Tenaga Ahli dan Akhirnya sekarang Penyelesaiannya dibantu oleh inspektorat”

- b. Menurut IG, (Kasi Pemerintahan)

“ sidamulya pernah menghadapi masalah yang lumayan besar saat itu, penyelesaiannya berjenjang dari internal duduk bersama bahkan dengan Camat dan jajarannya berjenjang, semua saling bantu memecahkan masalah”

- c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemeirntahan Kecamatan Wanareja)

“ satu kata dan kades bisa menyatukan visi dan pendapatnya, kades hendaknya bisa memanej semua perngkat yang ada dibawahnya. Karena kades merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sehingga dia bisa mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa”

- d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ kades bisa menjadi penengah dan pembuat keputusan akhir apabila terdapat perbedaan pendapat antar personil mengingat kades merupakan pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa”

- e. Menurut Md , (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“kades bisa membuat keputusan mana yang pendapat yang bisa dipakai untuk melakukan pekerjaan, jalan mana yang harus ditempuh untuk

menyelesaikan suatu masalah. Eksekusi terakhir ada pada kebijakan kepala desa.”

Dalam aspek kebijakan manajemen, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pimpinan dalam organisasi ?

a. Menurut ES, (Sekretaris Desa)

“ Belajar dari pengalaman, saat ada kebijakan kades ya kita harus melihat juga kesesuaian kebijakan itu dengan aturan yang ada, apabila bertentangan ya kita sampaikan saja kalau itu bertentangan, dan saya rasa Kades yang sekarang juga belajar dari masa lalu sehingga kebijakan-kebijakan yang ada ya kebijakan yang memang masih bisa kita laksanakan. Kebijakan yang membahayakan ya sudah tidak ada dalam pikiran mungkin, selamat lebih baik dari pada kebijakan yang menyesatkan”.

b. Menurut IG, (Kasi Pemerintahan)

“ dilihat kebijakannya, seandainya tidak bertentangan dengan aturan nggeh kita jalankan”

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemeirntahan Kecamatan Wanareja)

“kebijakan kades tentunya masing-masing desa tidak sama, akan tetapi selama ini kebijakan kades ya tidak ada yang protes karena ya sudah menjadi konsekuensi perangkat pasti menjalankan kebijakan tersebut, sepanjang semua disetujui oleh BPD, dan untuk masyarakat ya pasti akan dilaksanakan. seandainya ada yang tidak setuju dengan kebijakan kades pun, biasanya itu akan tetap dilaksanakan sepanjang tidak menentang hukum dan hanya perorangan yang tidak setuju ya tetap berjalan. Kenapa karena kepala desa mempunyai legitimasi tersendiri, kades dipilih oleh masyarakat sendiri, sehingga misal kebijakan terlalu menguntungkan satu pihak pendukungnya juga tidak akan terlalu dimasalahkan. Sampai saat ini sih kebijakan masih wajar, dan bisa dipahami oleh semua unsur baik masyarakat, perngkat dan juga tomasnya.”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ setiap kebijakan ya harus dilaksanakan karena itu keputusan kades, perangkat desa hanya menjalankan instruksi dari kades, sepenuhnya kebijakan ya tanggung jawab kades ”

- e. Menurut Md , (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“perangkat hanya menjalankan kebijakan pimpinan. Kades mestinya dalam mengambil suatu kebijakan sudah mempertimbangkan banyak hal.”

2. Apakah memicu peningkatan prestasi pada anggota organisasi?

- a. Menurut ES, (Sekretaris Desa)

“ prestasi kerja perangkat desa sepertinya tidak ada apresiasi khusus, sehingga ya kita bekerja dari tahun ke tahun ya seperti ini saja, paling kita menyelesaikan pekerjaan tepat waktu itu sudah prestasi karena tidak akan ada tagihan tahun berikutnya”

- b. Menurut AD, (Kaur Keuangan)

“ tidak ada”

- c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemeirntahan Kecamatan Wanareja)

“ agak susah untuk perangkat desa berprestasi, karena berprestasi atau tidak , bagi perangkat desa tidak ada ukurannya. Kinerja mereka kan tidak ada penilaiannya. Berbeda dengan PNS yang ada sasaran kinerja pegawai bisa diukur sejauh mana prestasi kerjanya. Kalo perangkat desa berbeda. Ada dan tidak ada prestasi juga sama tidka mempengaruhi siltap yang diberikan.”

- d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“sepertinya tidak berpengaruh, tidak ada hubungannya dengan prestasi perangkat desa”

- e. Menurut Md , (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ tidak ada seperti ”

3. Bagaimana cara pimpinan merespon konflik antar anggota?

- a. Menurut ES, (Sekretaris Desa)

“ untuk menjaga marwah pemerintah desa ya jangan sampe ada konflik yang menjadi berkepanjangan, harus diselesaikan karena mengganggu ketenangan bekerja dan kenyamanan interaksi dengan teman-teman perangkat”

b. Menurut IG, (Kasi Pemerintahan)

“ duduk bersama menyelesaikan permasalahan sebelum merembet ke hal yang mungkin bisa menjadikan kita tidak bisa bekerja dengan baik”

c. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemeirntahan Kecamatan Wanareja)

“ menjadi penengah, dan memastikan konflik selesai tidak berkepanjangan”

d. Menurut OL, (Pendamping Desa Kecamatan Wanareja)

“ mengayomi, menjadi penengah agar konflik selesai, duduk bersama mencari solusi dari masalah”

e. Menurut Md , (Pelaksana seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ kalo sama kades biasane manut, jadi ya kades harus bisa menjadi juru damai, mencari solusi dan memastikan apabila hal-hal seperti itu jangan sampai terulang lagi dimasa yang akan datang”

Secara global Camat Wanareja, IA juga menyampaikan pandangannya

terhadap semua aspek efektifitas yang ada di Desa Sidamulya, sebagai berikut :

“ Sidamulya, dalam sejarahnya memang unik ya merupakan pecahan dari Desa Wanareja, ditahun 1990 Desa Wanareja dimekarkan menjadi 3 desa yaitu, Sidmaulya, Wanareja dan Adimulya. Desa Sidamulya juga merupakan desa yang masyarakatnya dikenal menghasilkan tanaman palawija dan juga sayur-mayur, serta Desabyang selalu siaga dengan bencana banjir. Pemerintah Desa Sidamulya juga sempat mengalami cobaan dengan terlibatnya Kades Sidmulya periode sebelumnya dalam Kasus Prona yang menjadikan Pemdes Sidamulya sempat menjadi sorotan. Beruntung semua bisa diatasi dan hanya melibatkan pribadi kadesnya. Pemdes Sidmulya sekarang banyak berbenah diri dari pengalaman tersebut sehingga untuk administrasi bisa dikatakan sudah baik, meski dnegan perangkat desa yang sudah banyak juga yang sepuh. Ujian sidmulya belum selesai dengan munculnya kasus BUMDes, sehingga ya mungkin kedepan harus lebih cermat lagi dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. efektifitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa saat ini didesa sidamulya ya bisa dikatakan belum terlalu efektif atau belum sepenuhnya efektif, masih tergantung dengan satu orang, semua tergantung dengan sekdes karena ya itu kasi yang lain sudah berumur dan sekarang jamannya teknologi yang bisa hanya beberapa orang saja, kedepan harapannya seandainya ada pengisian perangkat hendaknya yang bisa teknologi, terlebih pada saat tes perangkat

saat ini ada tes praktek untuk komputer. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi pengadministrasian di desa.

4.1.3. Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Wanareja Kabupaten

Cilacap

Hal lain yang diteliti adalah tentang Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa di Wilayah Kecamatan Wanareja. Narasumber atau Responden adalah Kasi Tata Pemerintahan, dan Pendamping Desa.

1. Apakah Siklus Pengelolaan Keuangan Desa di 3 Desa sample sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa?

a. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan)

“ Pengelolaan Keuangan Desa untuk Kabupaten Cilacap diatur dalam Peraturan Bupati No. 257 Tahun 2018 . Peraturan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban sampai ke pelaporan. Untuk perencanaan semua desa sudah sesuai dengan peraturan yang ada dimana semua program dan kegiatan yang dibuat mengacu kepada permendes dan tercantum dalam APBdes dan yang paling penting ditetapkan dengan Musdes. Semua sudah melakukan itu. Untuk Pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan mulai dilaksanakan setelah APBDes ditetapkan dan RAB atau DPA selesai dibuat dan disahkan di dalam pelaksanaan ini termasuk didalamnya adalah pengadaan barang jasa, SPP, lampiran bukti transaksi ini biasanya yang masih memerlukan perhatian khusus. Penatausahaan adalah pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun melalui buku kas umum. Saat ini semua desa juga sudah melakukan penatausahaan dan ini juga dibantu oleh suatu sistem yaitu siskeudes. Pelaporan adalah laporan smesteran baik smester 1 dan semester 2, ini melaporkan tentang laporan realisasi dari pelaksanaan kegiatan. Pertanggungjawaban sendiri adalah laporan tahunan termasuk LRA dan juga Laporan Akhir Tahun. Untuk memantau dan melihat pelaksanaan pengelolaan keuangan ini kami dari kecamatan membentuk suatu tim untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pengelolaan keuangan desa. Tim biasanya turun setelah dana desa turun dan desa melaksanakan kegiatan. Dari hasil evaluasi tim monev untuk Desa Tambaksari sudah baik, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa saat dilaksanakan monev juga rata-rata lengkap hanya paling kekurangan

tandatangan. Untuk hasil pelaksanaan pekerjaan fisik desa tambaksari sangat baik. Untuk desa madura sudah cukup bagus tersisa rekapan pajak yang belum diselesaikan, pekerjaan fisik juga cukup baik. Sementara desa sidamulya buku administrasi bagus, pajak sudah terbayarkan semua hanya tinggal melakukan input masih belum terinput semua, fisik cukup bagus dan kelengkapan Pengadaan Barang jasa mungkin harus dilihat lagi karena masih ada kekurangan dokumen. Dan PR untuk Madura adalah SPJ yang sering sekali terlambat, Sidamulya paling hanya 2 bulan tapi Madura baru sampe di bulan ke 7 ”

b. Menurut OL, (Pendamping Desa)

“ secara keseluruhan untuk pengelolaan keuangan desa sudah cukup baik, hanya saja masih ada beberapa desa yang sering terlambat menyelesaikan SPJnya, jadi sering terlewat beberapa bulan. Madura sekarang sudah lumayan tapi masih banyak PR terlambat setor SPJnya, masih baru sampai bulan ke 7, Sidamulya tinggal sedikit lagi, tambaksari selesai.”

1. Bagaimana Pelaksanaan dari asas Pengelolaan Keuangan Desa di Wilayah Kecamatan Wanareja?

a. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa ada nilai-nilai yang harus senantiasa menjiwai dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa, agar apabila nilai-nilai itu terpenuhi maka baik itu masyarakat, APH, maupun pemeriksa melihat bahwa tata kelola keuangan desa baik dan ini menunjang untuk mewujudkan *good governance*. Pengelolaan Keuangan Desa harus transparan, partisipatif, akuntabel dan tertib.”

b. Menurut OL, (Pendamping Desa)

“Pengelolaan Keuangan Desa wajib Transparan, Partisipatif, Akuntabel dan Tertib. Agar pengelolaan keuangan desa tersebut baik, dan dipercaya oleh masyarakat.”

2. Apakah Desa di Kecamatan Wanareja sudah semuanya menerapkan Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, dan Tertib tersebut ?

a. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ yang pertama **Transparansi**, disini Pemerintah Desa harus terbuka, dalam artian terbuka tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dapat Uang

berapa, digunakan untuk kegiatan apa saja, dimana saja lokasi kegiatannya, dapat uang dari mana saja, itu semua *stake holder* harus tau, harus dibebaskan semua. Media yang digunakan untuk itu banyak, bisa info grafis APBDes, disitu tercantum dana yang dikelola, kemudian di akhir tahun anggaran juga dibuat info grafis lagi tentang laporan realisasi anggaran. Papan proyek, semua kegiatan fisik harus ada papan proyeknya, bisa hanya papan menggunakan banner maupun dibuatkan prasasti boleh. Yang kedua adalah **Akuntable**, kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang diterima dan pelaksanaan kebijakan kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta pertanggungjawaban. Kades wajib melaporkan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan jajaran pemerintahan di atasnya sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku. Kemudian **Partisipatif**, ini pun wajib melibatkan warga masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan APBDes, apa semua boleh? Warga masyarakat desa punya perwakilan di Badan Permusyawaratan Desa, ada Tokoh Masyarakat, ada keterwakilan Perempuan lewat PKK, Karang Taruna untuk kepemudaannya, semua hadir di Musyawarah Desa untuk membahas Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan, semua bisa terbuka berbicara disitu tentang apa yang bisa didanai, apa yang harus dikerjakan agar Desa semakin baik, semakin maju, pemberdayaan masyarakatnya semakin bagus, ujungnya desa bisa mandiri, tata kelola pemerintahan baik, masyarakat tercukupi. Partisipasi masyarakat diwajibkan dalam beberapa Kegiatan, seperti Penetapan Penerima BLT itu juga melalui mekanisme Musdes. Ketiga asas ini sudah dilaksanakan oleh semua desa di Kecamatan Wanareja, semua sudah melaksanakan Musdes, tim Kecamatan juga di hadir dalam pelaksanaan Musdes. Untuk pertanggungjawaban kita juga monitoring melalui tim monitoring dan input OMSPAN juga (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) selain itu Banner atau Infografis ada di tiap Desa. Untuk yang Keempat, tertib dan disiplin anggaran, Desa harus melaksanakan pengelolaan anggaran, pencatata-penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, di point ini Desa-desa terkadang masih belum sepenuhnya melaksanakan sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan tentang pengelolaan keuangan. Wujudnya seperti, telat melaporkan SPJ ke Kecamatan, belum menyelesaikan SPJ padahal sudah seharusnya diselesaikan. Proses Pengadaan Barang Jasa belum sepenuhnya sesuai dengan Prosedur PBJ, tidak berjalannya BUMDes sesuai regulasi yang ada. Macam-macam.

b. Menurut OL, (Pendamping Desa)

“ untuk desa-desa di Kecamatan Wanareja pada dasarnya sudah melaksanakan semua hanya ada prinsip atau asas yang pelaksanaannya mungkin belum sesuai harapan. **Transparansi**, semua sudah

melaksanakan lewat info grafis masyarakat dan siapapun bisa melihat tentang anggaran, papan proyek sudah ada dipasang di proyek-proyek fisik seperti pengerasan jalan, pembangunan Jitut, Pembangunan Jalan Usaha Tani, banyak macamnya prasasti juga ada. **Akuntabilititas**, sudah dibuat pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilititas pengelolaan keuangan desa dilaporkan juga baik fisik SPJnya dibawa ke Kecamatan, maupun lewat OMSPAN, **Partisipatif** semua desa melaksanakan Musdes baik Perencanaan maupun Penetapan dan Pertanggungjawaban. **Tertib dan Disiplin Anggaran**, ini mungkin yang masih agak kurang pelaksanaannya. Desa-desanya harus dioprak-oprak apalagi saat penyelesaian Pertanggungjawaban. Saat pencairan cepet saat pertanggungjawaban lama, telatnya sampai lewat berbulan-bulan. Di Tahun 2024 saja ada desa yang 2023 belum selesai semua SPJnya.

4.1.4. Efektifitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Desa?

1. Apakah sumber daya manusia yang ada di Desa (Perangkat Desa)

mempunyai pengaruh dalam Pengelolaan Keuangan Desa?

- a. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan)

“ berpengaruh sih terutama kekompakan Timnya, Tambaksari Sekdesnya tidak terlalu mahir sebenarnya agak lambat terkadang berpikirnya, akan tetapi kaur dan kasi yang lain ini sangat responsif dan mereka solid sehingga ya kompak dan membuat pekerjaan jadi cepat selesai. Untuk Madura bu sekdes sebenarnya pinter kekurangannya hanya dia orangnya tidak enakan, jadi kadang nggak enak mendisposisikan pekerjaan ditambah timnya masih baru yang muda-muda jadi terkesan sendiri-sendiri, dan lagi posisi kasi yang sudah sepuh agak membuat dilema buat bu sekdes, diikutkan agak susah pahamnya tidak diikutkan tidak ada orang lagi. Sidamulya sekdesnya sudah berpengalaman, mau bekerja keras dan mahir juga di siskeudes, hanya bendaharanya sudah berumur, tidak mudengan tapi cukup terbantu oleh kasi pemerintahan dan kaur umum sehingga mereka bisa berjalan dengan cukup baik”

- b. Menurut OL, (Pendamping Desa)

“ ya sangat berpengaruh, di tambaksari orangnya rajin-rajin sudah bisa berjalan sendiri jadi lebih mudah mengkondisikan timnya. Untuk madura bu sekdesnya agak bingung dan rikuhan jadi ya terkesan sendiri-sendiri, belum lagi yang kerja-kerja yang nggak enak aja ya ada. Sidamulya sekdesnya berperan sentral, semua sekdesnya dengan hanya dibantu kasi pemerintahan dan kaur umum, yang lain sudah sepuh-sepuh tapi ya

lumayan semangat membantu semampunya yang mereka bisa sehingga ya seperti SPJ dan kegiatan bisa berjalan”

2. Apakah latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa?

a. Menurut Ly, (Plt. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Wanareja)

“ berpengaruh, dari mulai kadesnya di Wanareja kan ada 3 Kades yang mengenyam pendidikan tinggi sampai Sarjana, tiga-tiganya mempunyai cara pandang yang lebih luas lebih cermat dalam memandang persoalan. Cara mereka kades-kades yang sarjana dalam mengelola perangkat memanj perangkatnya itu lebih baik, hubungan antar personal di dalam Pemerintahan Desa juga lebih nyaman, sehingga sekdes dan perangkat lainnya akan lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kades lebih bisa mencerna aturan-aturan yang ada untuk kemudian diterapkan dalam sistem organisasinya.”

b. Menurut OL, (Pendamping Desa)

“ berpengaruh, Pak Kades yang sarjana dengan yang SMA jauh dalam mengorganisir teman-teman perangkat yang lain. Karena ada juga desa yang Kadesnya SMA, Sekdesnya Sarjana itu susah juga mencari titik temunya. Pak Kadesnya kadang nggak mau dikasih tau sama sekdesnya tentang aturannya harus begini, ngeyel Kadesse lah, dulu be bisa ora kudu kaya kuwe. Jadi kalo diamati ada GAP komunikasi juga, ora tekan pikiranne kadesse sama apa yang dipikirkan oleh Sekdes yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi. Sekdes lebih paham tentang Pengelolaan Keuangan Desa dibandingkan dengan Kades. Makanya nek Kadesse Sarjana, perangkatte sarjana nyambung, Kadesse Sarjana perangkatte SMA ya masih nyambung, Kadesse SMA Sekdesse Sarjana biasane Kadesse angel diomongi nggawa kareppe dewek. Jadi sangat berpengaruh tingkat pendidikan dan juga keluwasan dalam berorganisasi sangat berpengaruh”

4.2 Pembahasan

4.2.1 Efektifitas Sumber Daya Manusia di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan setelah mendalami hasil wawancara serta mengamati data yang ada, maka dapat dikemukakan pembahasan atas tujuan penelitian mengenai efektifitas sumber daya manusia dalam hal ini perangkat desa di wilayah Kecamatan Wanareja. Suatu Organisasi bisa efektif mencapai tujuan organisasinya apabila terpenuhi beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi seperti yang dikemukakan oleh Richard M streert, yaitu karakteristik organisasi (struktur dan teknologi), karakteristik lingkungan (internal dan eksternal), karakteristik pekerja serta kebijakan dan praktek manajemen. Dari hasil pengamatan dan data yang ada keempat faktor ini memang benar mempengaruhi kemampuan organisasi. Struktur organisasi yang ada di desa sampel satu diantaranya berbeda dengan yaitu adanya jabatan kaur yang dipecah antara kaur umum dan kaur perencanaan, sedangkan di dua desa yang lain jabatan ini menjadi satu. Hal tersebut tentunya berpengaruh karena orang dengan hanya satu urusan tentunya lebih mudah fokus kepada urusannya, dibandingkan yang memegang dua urusan. Struktur Organsiasi Desa mengacu pada status desa berdasarkan Profil desa dan Kelurahan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan. Struktur organisasi yang membagi kewenangan dalam beberapa kepala urusan dan kepala seksi ditentukan dari hasil prodeskel yang dilaksanakan tiap tahunnya.

Potensi desa untuk berkembang dan infrastruktur yang ada didesa menjadi acuan dalam menentukan status desa menurut Prodeskel. Semakin banyak potensi desa untuk berkembang menjadi lebih baik dan semakin komplitnya sarana infrastruktur penunjang perekonomian, kesehatan dan pendidikan menjadi indikator bahwa masyarakat desa tersebut semakin dinamis dan semakin maju. Untuk itu maka ada tingkatan desa swadaya, swakarya dan swasembada yang menjadi dasar untuk menentukan struktur organisasi pemerintah desa.

Desa dengan status Swasembada wajib mempunyai 3 kepala urusan (Kaur) dan 3 kepala seksi (Kasi). Desa ini mempunyai ciri pengelolaan administrasi desa dilaksanakan dengan baik, Lembaga sosial dan pemerintahan berfungsi baik, partisipasi masyarakat sudah efektif, perdagangan dan jasa sudah berkembang, hubungan dengan daerah sekitar lancar, sudah menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dan pendidikan dan keterampilan penduduk sudah tinggi. Status desa Swakarya adalah desa transisi dari desa Swadaya menuju desa Swasembada, merupakan desa yang sedang berkembang dan mulai menggunakan potensi yang dimiliki namun masih mempunyai keterbatasan dana. Pendidikan dan perekonomian mulai meningkat, Pemerintahan Desa berkembang baik dan administrasi desa sudah mulai berjalan.

Dalam struktur organisasinya juga mempunyai pengaruh tersendiri. Struktur Organisasi yang mempunyai dua kepala urusan dan tiga kepala seksi akan berbeda kinerjanya dengan Organisasi yang mempunyai Struktur Organisasi tiga kepala urusan dan tiga kepala seksi.

Menurut Streert, karakteristik struktur organisasi berpengaruh terhadap efektifitas organisasi, pembagian tugas yang jelas memudahkan pencapaian tujuan organisasi dengan mudah. Dalam struktur organisasi desa sudah ada pembagian tugas yang jelas dengan fungsi masing-masing dari jabatan tersebut.

Dari hasil penelitian diatas disebutkan bahwa 1 dari 3 desa sample mempunyai struktur yang berbeda diposisi kepala urusan. Tentunya hal tersebut menjadi berbeda dalam fokus pelaksanaan tugasnya. Desa dengan 3 kepala urusan lebih baik pengelolaan administrasi keuangannya dibanding dua desa lainnya, ini dimungkinkan dari lebih fokus terhadap tugas pokok dan fungsinya yang lebih terperinci. Sistem koordinasi menjadi alat dalam menyampaikan pesan atau komunikasi dari atasan, ataupun memahami kondisi dalam lingkungan organisasi. Organisasi pemerintahan desa yang mudah dalam berkoordinasi dan berkomunikasi lebih bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada masing-masing perangkat desa yang tergabung dalam tim pengelolaan keuangan desa lebih mudah diselesaikan pada pemerintahan desa yang mempunyai koordinasi yang mudah.

Masing-masing anggota tim yang kompak tentunya lebih mudah menyampaikan kesulitan yang dihadapi, hambatan dilapangan yang ditemui kepada rekan tim yang lain, dibandingkan dengan pemerintahan desa yang mengalami kesulitan dalam koordinasinya, kemacetan komunikasi akan menghambat penyelesaian masalah atau kendala yang ditemui. Faktor lain yaitu teknologi merupakan salah satu karakteristik efektivitas organisasi menurut Richad M Streert, untuk memudahkan pekerjaan demi tercapainya tujuan

organisasi, teknologi lazim digunakan dalam proses pekerjaan, entah itu sebagai suatu sistem komunikasi atau teknologi untuk memudahkan mengerjakan suatu pekerjaan.

Dalam manajemen pemerintahan dewasa ini teknologi sudah menjadi alat atau sarana untuk mempermudah pekerjaan. Dibangunnya berbagai macam aplikasi untuk mempermudah pembukuan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Dengan adanya sistem aplikasi terpadu memudahkan tugas seseorang dalam jabatan tertentu untuk bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat waktu.

Pengelolaan keuangan desa juga menerapkan suatu aplikasi yang memudahkan penggunanya yaitu pemerintah desa untuk menyelesaikan pengadministrasian pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu perangkat desa juga dituntut untuk bisa menguasai teknologi tersebut sehingga memudahkan dan meminimalisir kesalahan hitung secara manual. Desa – desa di Kecamatan Wanareja sudah memanfaatkan sistem ini. Dari tiap desa biasanya hanya sekdes dan bendahara desa (kaur keuangan) yang biasa dan bisa menggunakan sistem ini, sementara agar lebih efektif harusnya semua pelaksanaan pengelolaan keuangan desa bisa melakukan input dalam sistem ini. Untuk transfer pembayaran belanja desa yang menggunakan Cash Management System yang bekerjasama dengan Bank Jateng juga masih hanya tambaksari yang sudah melakukan sistem tersebut di tahun 2023, dan desa lain baru belajar menggunakan ini di tahun 2024.

Apabila kita mengaplikasikan sistem teknologi sebenarnya merupakan salah satu dari usaha mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penguasaan terhadap teknologi membantu menuntaskan pekerjaan lebih cepat tepat dan akuntabel.

Karakteristik yang kedua yang mempengaruhi efektifitas organisasi adalah karakteristik lingkungan baik internal organisasi maupun eksternal organisasi. Pemerintah desa sebagai organisasi adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat komponen-komponen yang saling berhubungan, berkaitan dan bekerjasama untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Lingkungan organisasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi dalam hal ini kinerja perangkat desa. hubungan interpersonal yang baik, komunikasi yang mudah dalam suatu organisasi memudahkan tim memahami pekerjaannya dengan cepat, sehingga apa yang menjadi tujuan akan lebih mudah dicapai.

Dalam struktur organisasi tentunya diisi oleh berbagai macam karakter orang dan berbagai latar belakang pendidikan. Peneliti juga mengamati kualitas pendidikan ternyata juga mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan. Di Tambaksari dari mulai Kades, Sekdes, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum mereka mengenyam pendidikan tinggi, sementara di Madura hanya Sekretaris desa, Kaur Umum dan Perencanaan, dan Kasi Kesejahteraan yang mempunyai pendidikan tinggi, hal sama juga dialami oleh Perangkat Desa Sidamulya, dimana hanya Sekdes dan Bendahara atau Kaur Keuangan yang mengenyam pendidikan tinggi.

Seperti yang diungkapkan oleh spencer-spencer bahwa salah satu karakteristik kompetensi adalah pengetahuan. yang terlibat dan dengan komunikasi yang baik, dan lancar tentunya pesan ataupun disposisi pimpinan

tentang pekerjaan akan lebih mudah tersampaikan. Komunikasi yang baik antar personil dalam organisasi memudahkan sumber daya manusia didalam organisasi mudah untuk bergerak menyelesaikan tugas organisasi

Lingkungan eksternal berpengaruh terhadap organisasi, karena lingkungan eksternal akan mempunyai andil dalam menentukan keputusan dan kebijakan pimpinan. Perintah dari luar organisasi akan menentukan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pimpinan organisasi. Dalam pemerintahan desa, keputusan dan kebijakan yang diambil oleh kades juga dipengaruhi oleh disposisi atau perintah yang disampaikan atau diberikan dari luar organisasi seperti misalnya dari Organisasi Perangkat Daerah di atasnya Kecamatan maupun Dinas terkait. Begitu juga dengan keinginan dari masyarakat juga akan menentukan keputusan yang diambil oleh kades untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karakteristik yang ketiga adalah sifat pekerja, sifat dari personil atau sumber daya manusia dalam organisasi dalam menghadapi permasalahan ataupun dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemui dalam mengelola keuangan desa. dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pemerintahan desa yang mempunyai hubungan antar personal yang baik dengan komunikasi yang baik akan lebih baik dalam menjalankan roda pemerintahannya, dalam pengelolaan keuangan tentunya adlaah hal yang sangat penting mengingat kita harus senantiasa mengutamakan sikap tertib, disiplin dan akuntable dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

Sifat pekerja atau sumber daya manusia dalam organisasi teutama dalam organisasi pemerintahan juga harusnya adalah orang yang adaptif, mampu

menerapkan teknologi dan mampu menyerap adanya perubahan regulasi dengan cepat.

Teknologi sekarang menjadi sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat, daerah dan juga pemerintahan desa. Hampir setiap pekerjaan sekarang bersentuhan dengan teknologi, banyaknya aplikasi yang digunakan dalam pekerjaan terkadang mempermudah tapi juga bisa membuat terhambatnya suatu pekerjaan apabila sumber daya yang mengelolanya tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Pada saat melakukan input APBDes di dalam sistem baik itu Sistem Keuangan Desa atau siskeudes dan juga Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau Om SPAN, apabila perangkat desa tidak terbiasa dengan sistem teknologi tersebut maka akan sulit sementara sistem ini harus dipakai untuk pengelolaan keuangan desa. Pelatihan dan pendampingan terhadap sistem tersebut sangat diperlukan karena penguasaan sistem tersebut sangat membantu pelaksanaan pekerjaan. Sehingga orang atau personal dengan sifat yang adaptif, dan mau belajar serta bekerja keras seharusnya menjadi syarat atau pilihan untuk menjadi seorang perangkat desa. Hal ini tentunya belum banyak dipenuhi oleh desa-desa mengingat masih banyak desa yang mempunyai perangkat desa yang sepuh atau mendekati pensiun.

Akan tetapi saat pengadaan perangkat di tahun 2023 dan 2024 hal ini sudah menjadi point penting atau hal utama, mengingat adanya ujian khusus praktek komputer. Harapannya tahun tahun yang akan datang Perangkat Desa adalah sumber daya manusia yang unggul sehingga Pemerintahan Desa akan semakin baik, semakin tertib di masa yang akan datang.

Karakteristik terakhir yang berpengaruh mempengaruhi efektifitas adalah Kebijakan dan Praktek Manajemen. Di dalam Pemerintahan Desa Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Kades tidak bertanggungjawab kepada Camat , akan tetapi Camat sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan, memberikan pendampingan dan pengawasan kepada Desa.

Pemberhentian Kepala Desa merupakan kewenangan Bupati, terjadi apabila habis masa jabatannya, tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, melakukan larangan sebagai Kepala Desa, dan menjadi terpidana. Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang mempunyai kewenangan menetapkan sebagai berikut:

1. kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
2. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes
4. menetapkan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD)
5. menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan
6. menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa
7. menyetujui Surat Permohonan Pencairan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dibuat dan dilaksanakan untuk menghadapi hambatan dalam lingkungan tertentu. Kepala Desa selaku pimpinan yang memegang kewenangan tertinggi pada Pemerintahan Desa mempunyai kewenangan untuk membuat

kebijakan tertentu menyangkut pengelolaan keuangan desa dan tugas pemerintahan desa lainnya, harapannya agar bisa lebih mudah dan lebih sesuai dengan kondisi desanya masing-masing.

Praktek Manajerial, atau pengelolaan manajemen yang bagus mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam semua aspek pelaksanaan pekerjaan tentunya akan lebih meningkatkan mutu dari organisasi itu sendiri. Dalam hal pengelolaan keuangan desa sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa tentunya harus memahami siklus pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban harus sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak meninggalkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Tepat waktu, tepat jumlah dan konsisten tentunya akan membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa menjadi akuntabel dan baik. Itu semua tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan integritas yang baik.

Banyaknya aturan dan regulasi yang sering berubah, teknologi informasi yang digunakan dalam proses pekerjaan betul-betul membutuhkan sumber daya manusia yang lebih baik, yang lebih siap. Apabila dulu Perangkat Desa kebanyakan diisi oleh orang-orang yang memprioritaskan hanya pengabdian, hanya orang-orang yang mau dan kebanyakan tidak mempunyai pendidikan yang tinggi di jaman sekarang itu semua mungkin harus diganti dengan memilih orang-orang yang mempunyai kompetensi yang baik, mempunyai skill yang bagus dan mempunyai komunikasi yang baik dengan semua *stakeholder* atau yang memiliki

kepentingan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga tujuan pemerintahan desa bisa dicapai dengan baik. Pelatihan dan pembekalan tentang peraturan dan regulasi juga harus terus dilakukan untuk membuka wawasan baru bagi sumber daya manusia pemerintahan desa khususnya perangkat desa agar tidak tertinggal dalam informasi dan senantiasa mempunyai pengetahuan yang baik tentang kebijakan pemerintahan agar bisa menerapkan atau mengimplementasikan dengan tepat peraturan dan regulasi yang ada.

4.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap

Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Wanareja dari penelitian, di 3 (tiga) desa sample, adalah bahwa Desa di Kecamatan Wanareja sudah melakukan pengelolaan keuangan desa dan memanfaatkan teknologi yaitu beberapa aplikasi yang ada untuk pengelolaan keuangan desa melalui Siskeudes, untuk monitoring realisasi keuangan desa melalui OMSPAN, dan untuk pengelolaan bantuan keuangan khusus dari kabupaten melalui Baso. Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 ada 4 asas yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti belum sepenuhnya diterapkan di semua desa, dijelaskan sebagai berikut :

1. Transparan, terbuka dan tidak ada yang ditutupi.

Dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Wanareja, semua desa sudah membuat paparan tentang APBDes berupa infografis yang dipasang dan terpampang di desa masing-masing, baik itu berupa infografis Anggaran APBDes dan juga Realisasi dari APBDes. Dengan adanya infografis tersebut semua pihak

yang membutuhkan informasi tentang keuangan desa bisa dengan mudah mendapatkan informasinya dan masyarakat juga mengetahui tentang pengelolaan keuangan desa. Hal ini juga untuk memenuhi hak masyarakat karena masyarakat adalah pemilik anggaran yang sebenarnya. Disamping itu juga untuk menghindari konflik dari orang-orang yang mempunyai prasangka tentang pengelolaan keuangan desa oleh perangkat desa yang bersangkutan. Info grafis tentang kegiatan yang dilaksanakan seperti papan nama proyek untuk kegiatan fisik yang mencantumkan sumber dana, nama proyek, tahun kegiatan, besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai proyek tersebut, waktu pelaksanaan pembangunan, dan nama pihak ke tiga yang mengerjakan proyek disebutkan dengan jelas. Dan papan proyek ini akan tetap ada biasanya sampai dengan dilaksanakannya monitoring oleh Tim Monitoring dan Evaluasi dari Kecamatan atau dari Kabupaten. Selain itu desa juga dibolehkan memasang Prasasti apabila diperlukan.

2. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, secara administrasi, moral dan hukum.

Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang diterima dan pelaksanaan kebijakan kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dari penggunaan dana desa harus bisa dipertanggungjawabkan. Desa menyampaikan Laporan SPJ ke Kecamatan, selain itu sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap Pemerintah Desa Kecamatan wajib untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap

pengelolaan keuangan desa. Untuk itu Pemerintah Kecamatan Wanareja membentuk tim untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Tim terdiri dari Seksi Tata Pemerintahan untuk administrasi pengelolaan keuangan desa dan tim dari seksi Pemberdayaan Masyarakat untuk monitoring lapangan hasil pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Disamping itu desa-desa juga akan dilakukan evaluasi oleh Inspektorat, akan tetapi karena banyaknya desa di Kabupaten Cilacap, tidak setiap tahun inspektorat turun ke desa. Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, Inspektorat saat ini mempunyai pilot project tentang desa anti korupsi. Desa anti korupsi yaitu suatu program atau konsep yang mencegah tindak pidana korupsi di dalam pemerintahan desa, sehingga pemerintahan desa lebih transparan, akuntabel dan partisipatif. Program ini baru mulai berjalan di tahun ini dengan pilot project masing-masing kecamatan baru satu, dan masih dalam tahap sosialisasi dan pencahangan. Diharapkan dengan adanya pilot project ini aparatur pemerintahan desa di seluruh kabupaten cilacap makin sadar akan pentingnya mempunyai nilai-nilai anti korupsi dan menanamkan kejujuran dan transparansi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa yang menjadi tujuan bisa dicapai. Ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

3. Partisipatif, mengutamakan keterlibatan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang ada dalam tata kelola pemerintahan desa, apabila pengelolaan keuangan desa baik maka tata kelola pemerintahan desa tersebut akan baik. Tata kelola pemerintahan yang baik diukur dari dimulainya proses penyusunan dan

pertanggungjawaban APBDes. APBDes sebagai dokumen publik sudah seharusnya disusun dengan partisipasi dari masyarakat sebagai pemilik anggaran yang sebenarnya. Masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan anggaran, agar masyarakat mengetahui seberapa besar pendapatan yang diterima desa, dan anggaran tersebut dipergunakan untuk belanja apa saja.

Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran, dan pertanggungjawaban melalui musyawarah desa juga akan tercipta transparansi pengelolaan keuangan desa. Masyarakat mengetahui secara pasti hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan, akan dilaksanakan dan sedang dilaksanakan. Di Kecamatan Wanareja semua sudah melalui proses musyawarah mulai dari tingkat dusun sampai desa, untuk penetapan APBDes dan juga untuk pertanggungjawaban APBdes, serta beberapa musdesus seperti untuk penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penerima bantuan sosial.

Asas partisipatif penting dalam pengelolaan keuangan desa sebagai sarana masyarakat untuk bisa terlibat efektif dalam pengelolaan keuangan desa dan juga membuka ruang bagi peran serta masyarakat. Dengan dilibatkannya masyarakat juga memenuhi hak masyarakat sebagai stake holder, disamping itu menumbuhkan rasa memiliki sehingga hasil-hasil pembangunan yang dibiayai oleh dana desa atau bansus akan dijaga dan dipelihara dengan baik, seperti jalan kemudian WC umum dan keterlibatan ini juga akan menumbuhkan keswadayaan masyarakat. Masyarakat akan dengan mudah menegluarkan swadaya untuk merawat hasil pembangunan tersebut.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran, Konsisten, Tepat Waktu, Tepat jumlah dan Taat Asas.

Dalam pengelolaan keuangan desa mungkin asas ini yang agak berat untuk dilaksanakan dan masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Tertib berarti sesuai dengan jadwal yang ada konsisten dengan keadaan yang ada, prakteknya di lapangan adalah banyak keterlambatan. Bukan hanya dari desa akan tetapi penyediaan dana dari pusat juga terkadang juga tidak melihat situasi. Pencairan dana desa tahap tiga terkadang sangat mepet dengan berakhirnya tahun anggaran, tentunya juga ini terkadang memberatkan desa.

Desa sendiri dari hasil monitoring yang dilakukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan masih banyak yang tidak tepat waktu. Untuk tahap 1 yang seharusnya selesai sebelum tahap 2 dicairkan masih ada SPJ yang belum diselesaikan. Bahkan masih ditemukan SPJ bulan Agustus, di bulan Maret masih sedang dikerjakan. Pembayaran pajak masih banyak yang belum diselesaikan baik itu pembayarannya maupun input laporannya. Sumber Daya Manusia sangat diperlukan dalam penerapan asas ini. Sumber daya manusia yang siap, terampil dan cepat menyerap regulasi yang ada akan lebih siap untuk mengerjakan surat pertanggungjawaban (SPJ) pengelolaan keuangan desa. Kemampuan menguasai teknologi juga saat ini teramat dibutuhkan sebagai dukungan utama dalam menjalankan pekerjaan di era sekarang.

Pelatihan dan pendampingan juga senantiasa harus selalu dilakukan agar sumber daya manusia yang tersedia senantiasa bisa menambah pengetahuan. Pembinaan dan monitoring serta evaluasi juga harus terus dilakukan agar semua

pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari koridor peraturan yang ada

4.2.3 Efektifitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.

Peraturan tentang Sumber daya manusia dalam hal ini Perangkat Desa di Cilacap diatur dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 100 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan ini masih menjadi dasar dalam mekanisme rekrutmen Sumber Daya Manusia yang akan menjadi Perangkat Desa. sementara Pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Cilacap, didasari dengan Peraturan Bupati Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disamping itu juga ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perangkat Desa dulu merupakan pekerjaan yang tidak banyak dilirik oleh kaum intelektual muda. Seiring dengan berjalannya waktu tata kelola pemerintahan desa sekarang tentunya juga berbeda dengan tata kelola pemerintahan desa dua dekade yang lalu. Saat ini pemerintahan desa dengan banyaknya dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat demi mewujudkan desa yang sejahtera memerlukan pengelolaan keuangan yang lebih maju dan lebih akuntabel.

Dari hasil penelitian dan pengamatan peneliti, dilihat dari sumber daya manusia yang sekarang ada di 16 desa di wanareja , dengan contoh 3 desa sampel yang diambil terlihat jelas peran kaum muda intelektual dalam pengelolaan

keuangan desa dominan dan menunjukkan tren yang bagus. Desa yang mempunyai perangkat desa dengan pendidikan yang tinggi akan lebih baik dalam tata kelola pemerintahan desa, khususnya pengelolaan keuangan desa. terlebih apabila didukung dengan pucuk pimpinan, yaitu kepala desa (kades) yang juga mempunyai pendidikan tinggi. Kepala Desa (Kades) dengan latar belakang pendidikan tinggi kenyataan dilapangan tetap mempunyai nilai lebih baik dalam mengatur organisasi dibanding Kades yang memiliki pendidikan di tingkat menengah.

Pengetahuan dan skill seperti yang disampaikan oleh spencer-spencer dan salah satu aspek yang disampaikan oleh Richard M. Streets , yaitu karakteristik pekerja, benar memang berpengaruh terhadap efektivitas. Pengelolaan Manajemen Pemerintahan Desa atau Tata Kelola Pemerintahan Desa sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan dan kualitas Kepala Desa. Hal ini dikarenakan Kepala Desa merupakan pemegang kendali utama Pemerintahan Desa. Kebijakan yang diambil oleh Kades dan juga Cara Kades menjalankan Organisasi mempunyai pengaruh dalam kesuksesan Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. Latar belakang Pendidikan, Kondisi atau Karakteristik Pribadi Kades berpengaruh dalam menjalankan organisasi. Perangkat yang lain tetap dibawah kendali Kades.

Efektifitas dalam pengelolaan keuangan desa sangat tergantung pada sumber daya manusia yang menjalankan tata kelola pemerintahan desa. Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Wanareja memang belum sepenuhnya efektif seperti sudah dijelaskan diatas bahwa asas pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya dilaksanakan. ini juga menjadi salah satu faktor belum

efektifnya pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Wanareja, ditambah juga dengan masih banyak Sumber Daya Manusia yang belum mempunyai kompetensi, skill dan pendidikan belum cukup memadai di Era dimana ketidakpastian, dan perkembangan teknologi berkembang dengan sangat cepat. SDM dengan kemampuan penguasaan teknologi saat ini dalam tata kelola pemerintahan desa sangat dibutuhkan.

Pelatihan, Pendampingan dan Pembinaan harus terus dilakukan. Hal ini untuk memudahkan Perangkat Desa pengganti yang masih muda cepat beradaptasi dan mengikuti ritme penyelenggaraan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dan semakin baik wawasan dan pengetahuannya tentang peraturan perundangan dan juga regulasi yang ada. Tentunya tambahan pengetahuan dan wawasan tersebut harapannya bisa diterapkan dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa khususnya Pengelolaan Keuangan Desa. Peran generasi muda yang mempunyai intelektual yang baik, dengan latar belakang pendidikan yang memadai saat sekarang memang betul-betul diperlukan untuk bisa membangun desa.

Sudah saatnya pucuk pimpinan di desa dijabat oleh generasi muda yang mempunyai wawasan yang luas. Kepala Desa yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi mempunyai nilai lebih, mempunyai wawasan dan cara pandang yang lebih luas, apalagi apabila disertai dengan skill dan komunikasi yang baik dengan masyarakat dan juga dengan segenap perangkat desa maka itu akan memudahkan desa dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Jabatan perangkat desa bukan hanya jabatan yang dipandang sebelah mata. Untuk bisa

membangun desa diperlukan perangkat desa yang berwawasan dan berkemampuan teknologi serta mempunyai integritas yang baik untuk bisa mencapai apa yang telah menjadi tujuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Masyarakat yang adil dan makmur, desa yang mandiri akan bisa diwujudkan dengan Pemerintah Desa yang mempunyai Tata Kelola yang baik. Pengelolaan Keuangan desa yang efektif dan juga Sumber Daya Manusia yang mumpuni menjadi alat untuk bisa mencapai tujuan tersebut.

Menurut apa yang disampaikan oleh Richard M. Streets bahwa karakteristik organisasi yang bisa mempengaruhi efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Demikian juga dengan sumber daya manusia, sumber daya manusia yang ada didalam organisasi sebagai penggerak dari organisasi dalam mencapai tujuannya hendaknya berisi orang-orang yang mempunyai kompetensi yang memadai, mempunyai sikap yang mau terus bekerja keras dan meningkatkan wawasan dan pengetahuannya. Mampu menjalin komunikasi yang baik dengan lingkungan pekerjaannya baik dengan sesama rekan kerja maupun dengan atasannya. Merujuk kepada penelitian ini berarti juga mampu berkomunikasi yang baik pula dengan masyarakat karena Pemerintah Desa mempunyai tujuan untuk memakmurkan masyarakatnya, memajukan desanya agar bisa tercipta masyarakat yang sejahtera. Sumber daya manusia juga bisa memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan desa. apabila sumber daya manusia mampu melaksanakan tugas pengelolaan keuangan desa dengan melaksanakan prinsip atau asas yang ada dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik akan terwujud.